**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kemunculan gerakan politik Islam radikal di awal abad ke-21 ini memang menjadi fenomena yang menarik. Gerakan politik Islam radikal bersikap sebagai suatu tantangan politis di dalam dunia modern. Gerakan Islam radikal kontemporer secara geografis tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika. Faktanya, hampir tidak ada satu wilayah pun di dunia yang tidak ada gerakan tersebut[[1]](#footnote-1)

Kelompok-kelompok Islam radikal tersebut mengkampanyekan jihad untuk melawan berbagai macam pemerintahan non- Muslim dengan tujuan mendirikan Negara Islam.[[2]](#footnote-2)

Tetapi dalam jangka waktu ini terdapat satu kelompok Islam radikal yang telah melakukan keseluruhan hal tersebut dan memulai dengan aksi teror. Kelompok tersebut menamai diri mereka Negara Islam (NI) atau *The Islamic State* (IS). Gerakan politik Islam radikal ini merupakan kelompok radikal paling berbahaya yang terkaya dan tersukses di dunia. Seluruh dunia sebagian besar mengenal kelompok ini dengan sebutan *The Islamic State in Iraq and Syria* atau *the Islamic State in Iraq and al-Sham* (ISIS).[[3]](#footnote-3)

Pada tanggal 29 Juni 2014 al-Baghdadi mengubah nama menjadi Islamic State (IS). Mereka menanggalkan nama Iraq dan Syria atau the Levant untuk menegaskan bahwa mereka menghendaki wilayah penguasaan lebih luas dari pada sekedar kedua wilayah tersebut. Maka muncul ISIS yang sekarang ini, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat sebagai kombinasi antara ideologi jihadisme, militer, militansi, dan kekerasan. Dengan ideologi khilafah dan Sunni, keberadaan ISIS ini bertujuan menandingi keberadaan insitusi Shi’ah di negara-negara yang ada Timur Tengah.[[4]](#footnote-4) Bahkan di bawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi ISIS mendeklarasikan Negara Islam di sepanjang Iraq dan Suriah dan juga menyatakan Al-Baghdadi akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di seluruh dunia.[[5]](#footnote-5)

 ISIS merupakan ancaman yang lebih besar dari al Qaeda, HAMAS, Hizbullah, Boko Haram dan seluruh gerakan Islam radikal lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilannya lebih besar. Gerakan politik Negara Islam menjadi gerakan Islam radikal pertama yang memerintah hamparan wilayah yang luas untuk jangka waktu yang panjang. Kelompok ini telah memenangkan loyalitas sebagian besar jihadis di seluruh dunia. Gerakan Negara Islam telah menyerukan kepada seluruh Muslim di dunia untuk melakukan serangan terhadap negara-negara Barat.[[6]](#footnote-6)

Pembentukan Negara Khalifah yang dinyatakan oleh Negara Islam, saat ini termasuk sebagian besar Irak dan Suriah, dari pinggiran Baghdad ke pinggiran Aleppo. Namun Negara Islam berusaha untuk memperluas Negara Khilafahnya keseluruh duia. Pada tanggal 29 Juni 2014, gerakan politik Negara Islam telah mencapai titik pembentukan Khilafah (sebuah pemerintahan yang mempersatukan seluruh Muslim di seluruh dunia). Kelompok yang memiliki nama Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) atau *Islamic State in Iraq and Syiria* (ISIS), mengahapus setengah namanya dan menyebut diri mereka Negara Islam atau *Islamic State*. Klaim ini merupakan upaya dalam pembentukan sebuah kekhalifahan baru dan menjadi daya tarik gerakan politik Negara Islam bagi Muslim di seluruh dunia dan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang bepergian dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan gerakan ini.[[7]](#footnote-7)

Dalam penyebaran ideologi radikal di era globalisasi ini, para kelompok radikal ini memanfaatkan penyebaran informasi melalui komunikasi internasional menyebarkan propaganda untuk memberikan ancaman bahkan mengajak masyarakat sipil bergabung dalam gerakan ini.[[8]](#footnote-8)

Terbukti fenomena pejuang luar negeri di Irak dan Suriah benar-benar global, dengan sekitar 86 negara melihat sedikitnya satu warga negaranya berangkat ke Suriah untuk bertempur bersama dengan kelompok-kelompok ekstrimis di sana, terutama gerakan Negara Islam. Lahan subur perekrutan telah muncul dan tersebar dalam arus global. Pada bulan Februari 2015, lebih dari dua puluh ribu Muslim dari seluruh dunia telah berangkat ke Irak dan Suriah untuk berjihad dengan gerakan Negara Islam[[9]](#footnote-9)

Mereka menjadi kelompok jihadis melalui kekerasan dan berusaha memperjuangkan Islam secara Kaffah, dimana syariat Islam sebagai hukum negra dan berusaha meyakinkan sesama muslim bahwa penggunaan kekerasan disahkan. Proyek Iskam Khilafah yang dicanangkan oleh Negara Islam menarik banyak perhatian para pejuang asing dari seluruh dunia. Ketika menjadi mercusuar bagi para banyak perekrutan dan jaringan fasilitas/logistik. Selanjutnya mereka yang telah berjuang bersama Negara Islam membuat koneksi dengan satu sama lain. Negara Islam juga terus membangun prestise dan legitimasi dalam ke seluruhan geraknnya.[[10]](#footnote-10)

Ancaman terhadap keamanan dunia pun hadir seiring dengan eksistensi dan pergerakan ISIS dalam upayanya mencapai kepentingan dalam menciptakan negara Islam. Berbagai strategi militer yang digunakan oleh ISIS, seperti pembunuhan massal, penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, dan pemenggalan tentara dan wartawan, telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia dan keamanan negara. ISIS sebagai sebuah fenomena yang telah mengancam kehidupan masyarakat lua. Hal lain yang menjadikan ISIS sebagai ancaman keamanan memberikan dampak kepada human security dan national security.[[11]](#footnote-11) Serangan- serangan teror yang dilakukan di belahan dunia barat pun semakin gencar, seperti serangan teror di enam lokasi yang berbeda di kota Paris. Hal menimbulkan efek terorisme menjadi ancaman kemanan yang nyata. Secara pararel, balasan dari upaya menghadapi dilemma teroris ini berupa hukum, negara berhak wajib untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi kesejahteraan warga negaranya.[[12]](#footnote-12)

Kekejaman ISIS bukan representasi Islam. Kekejaman ISIS yang melampaui batas kemanusiaan pun menuai protes dari umat Islam di Baghdad yang memprotes tindakan ISIS yang membunuh dan mengusir umat Kristiani di Mosul.[[13]](#footnote-13)

Gerakan radikal berlandaskan agama yang ingin mengubah tatanan politik di Indonesia pun tidak lepas dari gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini melakukan perlawanan termasuk secara militer kepada pemerintahan yang sah yang dianggap “murtad” karena menolak syariat Islam di Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Gerakan ini telah muncul sejak tahun 1948, namun baru di proklamirkan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini dianggap menjadi cikal bakal kelompok-kelompok perlawanan berlandaskan agama di Indonesia. Walau secara formal gerakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1962 yang ditandai dengan ditangkapnya Kartosoewirjo pada 4 Juni 1962, namunn gerakan ini sebenarnya tidak benar-benar mati.[[15]](#footnote-15)

Indonesia menjadi Negara dengan pergerakan kelompok yang sangat dinamis untuk melawan pemerintahan dan mengubah tatanan politik yang ada. Salah satu ancaman nyata pada saat ini ialah gerakan radikal Negara Islam. Selain menjaring perekrutan jihadis di seluruh dunia, Negara Islam melakukan serangan-serangan terror di seluruh dunia. Serangan teroris transnasional yang disebut melibatkan kelompok radikal ISIS pernah terjadi di Indonesia. Tragedi Bom Sarinah pada tahun 2016 menggegerkan dunia, karena ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan ini. Serangan itu menunjukan bahwa pendukung ISIS di Indonesia bertekad untuk kembali menempatkan negara pada peta terorisme global, tetapi korban tewas relatif rendah karena kemampuan terbatas jaringan ISIS di Indonesia[[16]](#footnote-16)

Hari ini jaringan dukungan ISIS di Indonesia terdiri dari jumlah kelompok yang terorganisir secara longgar seperti Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dan salah satu warga negara Indonesia yaitu Bahrun Naim dengan jelas tergabung dalam kelompok jaringan [Mujahidin Indonesia Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Mujahidin_Indonesia_Timur) (MIT) pimpinan Santoso alias [Abu Wardah](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Wardah) yang diketahui telah berbaiat ke [ISIS](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam).[[17]](#footnote-17)

Pada bulan Juni 2014 di Indonesia sudah terdeteksi kemunculan atau dampak dari ISIS. Jamaah Abshorut Tauhid (JAT) atau Negara Islam Indonesia (NII) telah menyatakan kesetiannya terhadap ISIS dan itu diminta langsung oleh Ba’asyir yang telah melakukan *bai’at* di Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah.. sejumlah anggota JAT udah ada yang bergabung dengan ISIS dan *JabhahNushra.*[[18]](#footnote-18)

Ideologi khilafah dan seruan komando dari Abubakar Al Baghdadi kepada seluruh wilayah negara termasuk Indonesia. Seruan jihad internasional itu telah direspon oleh kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia.[[19]](#footnote-19) Indonesia bukan kawasan steril dari kelompok-kelompok radikal fundamentalis. Sejak pemerintahan Bung Karno, nasionalisme diguncang separatisme DI/TII dan PKI (1940-1950an). Sejak pemerintahan Soeharto, nasionalisme diguncang wacana khilafah oleh Komando Jihad (1970-1980-an). BNPT selaku badan penanggulangan terorisme di Indonesia menganggap terdapat sekitar 20 kelompok Islam yang mendukung ISIS dan 50 orang telah pergi ‘berperang’ dengan ISIS. Mereka pergi ke Irak dan Suriah dan terlibat dalam pertempuran dan kembali ke Indonesia dengan membawa dan mengembangkan ideologi khilafah sebagaimana yang dilakukan ISIS di Irak dan Suriah. Selain itu adanya pengibaran bendera ISIS di berbagai tempat menguatkan indikasi bahwa penyebaran ideologi ISIS di Indonesia mulai meluas.[[20]](#footnote-20)

Dikarenakan maraknya dukungan terhadap ISIS di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan untuk memblokir situs yang berpaham radikal dan video yang berbau kekerasan yang dilakukan ISIS, operasi hukum bagi pendukung ISIS yang terbukti melakukan kekerasan dan melakukan operasi keimigrasian bagi Warga Negara Indonseia (WNI) yang menuju Timur Tengah dan Asia Selatan. Berbagai pula organisasi masyarakat ORMAS Islam yang menolak adanya paham ISIS di Indonesia termasuk NU, Muhammadiyyah yang menghimbau agar semua komponen bangsa untuk membentengi umat-umat muslim dari paham ISIS.[[21]](#footnote-21)

Melihat potensi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim menjadikan Indonesia lokasi yang tepat dalam penyebaran ideologi kekuatan Islam yang radikal dan serangan teror. Selain itu dalam upaya penyebaran ideologi gerakan Islam radikal seperti ISIS pun berusaha merekrut masyarakat Indonesia untuk bergabung, menjadi pejuang militan demi tercapainya perubahan politik dan persebaran ideologi di seluruh duia dan meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia.[[22]](#footnote-22)

Sebagai sebuah Negara Indonesia mutlak memiliki rakyat, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain yang kesemuannya itu merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam perjalanan sebuah Negara maka terdapat berbagai bentuk ancaman yang akan membahayakan stabilitas keamanan dalam negerinya.[[23]](#footnote-23)

Sistem politik keamanan Indonesia saat ini berfokus pengelolaan pertahanan keamanan komprehensif yang berkembang di dunia internasional maupun menyangkut *human security*. Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi telah menjadi ranah multisektor. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Karenanya konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencangkup pertahanan negara *(defence),* keamanan dalam negeri *(internal security*), keamanan public (*public security*), dan keamanan insani (*human security*).[[24]](#footnote-24)

Dalam usaha penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara paling tidak terkait pada empat fungsi untuk kepentingan keamanan yang bersifat nasional yaitu kedaulatan bangsa, pertahanan, tegaknya hukum dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat.[[25]](#footnote-25)

Pertahanan adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan Negara terhadap ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Sedangkan keamanan terkait dengan upaya menciptakan keamanan di dalam negeri terhadap segala ancaman yang mengganggu kehidupan masyarakat maupun pembangunan nasional.[[26]](#footnote-26)

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.[[27]](#footnote-27)

Gerakan radikal *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) merupakan bukti nyata terorisme telah menjadi satu kekuatan untuk melancarkan aksi kekerasan dengan mengatas namakan paham radikal untuk menyerang rezim yang tidak sejalan dengan paradigma yang diyakini.

 Melihat besarnya tingkat ancaman kelompok Islam radikal dengan tujuan mengubah sistem politik di Indonesia terlebih teror di pergerakan ISIS yang menjadikan Indonesia sebagai basis perekrutan militant. Maka fenomena kejahatan ini dapat berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara. Indonesia perlu meningkatkan stabilitas keamanan dan berupaya dalam menanggulangi ancaman nyata berupa teror dan radikalisme di Indonesia.[[28]](#footnote-28)

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul : **PENGARUH GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH TERHADAP STABILITAS POLITIK-KEAMANAN DI INDONESIA.**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Sejauh mana bentuk perjuangan ISIS dalam penyebaran ideologi nya di Indonesia ?
3. Sejauh mana persepsi ancaman ISIS terhadap perkembangan stabilitas politik-keamanan di Indonesia ?
4. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik keamanan dari ancaman gerakan ISIS?
5. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dan pembahasan yang akan dikemukakan, maka penulis membatasi masalah tersebut dengan menitik beratkan kepada upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik-keamanan di Indonesia.

**B.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah untuk penelitian sebagai berikut: **“Sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik-kemanan dan korelasinya dengan gerakan ISIS di Indonesia?”**

1. **Tujuan dan Kegunan Penelitian**

**C.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permaslahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodologis. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta mengembangkan bidang yang diteliti. Berdasarkan paparan tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pergerakan penyebaran ideologi ISIS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi ancaman gerakanISIS internasional terhadap stabilitas politik keamanan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik-keamanan dari ancaman terorisme ISIS.

**C.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian yang sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, baik bagi pembaca umum maupun penstudi Hubungan Internasional.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.
3. Sebagai syarat untuk menempuh ujian program studi Strata Satu (S1) dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Ip) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
4. **Kerangka Teori dan Hipotesis**

**D.1 Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah seperangkat teori, konsep, pendapat para ahli, atau jenis pengetahuan ilmu lainnya, yang dirangkaikan sedemikaian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komperhesif dan dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan juga premis minor yaitu teori yang bersifat khusu yang berkaitan dengan pembahasan.

Hubungan internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competion),*dan konflik (*conflict)* antar negara yang satu dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di seluruh dunia. Menurut K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional Kerangka Analisa mengemukakan bahwa :

**“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”[[29]](#footnote-29)**

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir, masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir, untuk itu masalah internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan system international. Menurut K.J Holsti, sistem inetrnasionaal adalah :

 ***“*Sistem internasional dapat didefinisikan sebaagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dan menerangkan berbagia perubahan besar dalam interaksinya”[[30]](#footnote-30)**

Studi hubungan internasional memiliki banyak teori ataupun perspektif yang kerap digunakan, salah satunya adalah pandangan realisme. Mereka yang menganut paham realis beranggapan *power* merupakan salah satu faktor yang dominan dalam suatu interkasi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuatan. Sepertin yang diungkapkan oleh Morgenthau tentang pendekatan realisme:

***“*Untuk menjamin agar tidak ada negara-negara berkekuatan besar (*great power)* berhasil mencapai posisi hegemoni atas dominasi keseluruhan, berdasarkan intimidasi, pakasaan, atau penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang, adalah penting bagi suatu negara untuk membangun dan memelihara keseimbangan kekuatan militer. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional”**[[31]](#footnote-31)

 Teori di atas memberikan dasar bahwa negara tidak akan lepas dari aspek keamanan dan juga konflik. Membangun stabilitas dan keseimbangan keamanan negara merupakan nilai yang sangat penting untuk berinterkasi dan mencapai tujuan suatu negara. Seperti halnya yang diungkapkan Bary Buzan dalam bukunya *People , State and Fear : An Agenda for Internatioanl Security Studies in Post Cold War Era* bahwa:

 **“Keamanan dalam konteks sistem internasional adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai kemanan kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya**, **dalam studi Hubungan Internasional dan Politik Internasional , keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri ekslusif yag konstan dari hubungan internasional.**[[32]](#footnote-32)

Penyimpulan Buzan menyatakan bahwa aspek keamanan telah menjadi suatu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional kontemporer dengan menunjuk kepada pelaku motif utama perilaku negara yang memiliki perbedaanya sendiri dengan power sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian.[[33]](#footnote-33)

Keamanan diambil harus tentang mengejar kebebasan dari ancaman dan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas independen dan integritas fungsional mereka terhadap pasukan perubahan, yang mereka lihat sebagai hal permusuhan. Inti keamanan adalah kelangsungan hidup tetapi juga mencangkup berbagai kekhawatiran tentang kondidi keberadaan substansial dari berbagai ke khawatitan dan hal-hal yang berlebel kemanan yang mengidntifikasi ancaman-ancaman seperti cukup signifikan untuk menjamin tindakan darurat.[[34]](#footnote-34)

Di era globalisasi sekarang ini ancaman terhadap kehidupan manusia tampaknya semakin luas daan beragam. Ancaman yang menyangkut keamanan negara dan kemanusian sekarang ini dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan global. Ancaman berupa teror dengan penggunaan aksi kekerasan dan kekuatan radikal semakin meningkat.

Berdasarkan tulisan Martha Crensaw terorisme adalah

**“Kegiatan terorisme adalah hasil dari keputusan organisasi dan dijadikan alat politik untuk menentang pemerintah. Kekereasan teroris mengkomunikasikan pesan politik yang juga dapat dimaksudkan untuk memprovokasi reaksi kontra terhadap pemerintah. Para korban atau objek dari serangan teroris memiliki nilai intrinsik kecil, reaksi yang besar dari khalayak manusia lah yang mereka cari”[[35]](#footnote-35)**

Terorisme global menjadi ancaman keamanan internasional yang memaksa semua negara untuk melakukan antisipasi yang tepat dan secara dini demi melindungi warga negaranya.[[36]](#footnote-36) Oleh karena itu diperlukan strategi yang dikeluarkan untuk membangun keamanan negara seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dkk, dalam dalam bukunya Kamus Analisa Politik menyatakan bahwa:

**“Strategi adalah suatu ancang-ancang untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan lain. Strategi biasanya mencangkup seangkaian gerakan yang lansung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sebaliknya taktik terdiri dar gerakan tunggal atau serangkaian langkah terbatas kea rah tujuan antara (*intermediate)* di dalam perencanaan strategy yang lebih luas”[[37]](#footnote-37)**

Dengan adanya isu terorisme yang berlandaskan agama tentu dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Ancaman terorisme beratas namakan agama akhir akhir ini memaksa Indonesia untuk meningkatkan stabilitas keamanannya. Seperti yang dikemukakan oleh Jack C Plano dkk mengenai definisi stabilitas adalah:

**“Stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung terjadi di dalam, atau kembali pada, suatu hubungan yang sudah mantapp. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan”**[[38]](#footnote-38)

Untuk menjaga stabilitas keamanan, Indonesia perlu dan harus mempunyai kebijakan tersendiri untuk melindungi rakyatnya baik ancaman dari dari dalam atau luar negeri. Seperti yang dikemukakan oleh K.J Holsti sebagai berikut:

**“Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu alam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain”.[[39]](#footnote-39)**

Ancaman berupa serangan teror dan kekerasan yang dilakukan Kelompok Negara Islam. Secara garis besar gerakan adalah sekelompok atau suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai target tertentu, berusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya. Dengan demikian, sebuah kelompok dapat disebut sebagai gerakan apabila: (1) mempunyai landasan tertentu; (2) mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan; (3) mempunyai metode untuk meraih target.[[40]](#footnote-40) Terdapat empat gerakan dalam Islam yaitu, Islam Moderat, Islam Liberal, Islam Fundamental, Islam Radikal:

1. Islam Moderat, Islam yang mampu berdialektika dengan lingkungan dan teguh dalam berideologi. Bagi Islam Moderat hal ini memang tidak mudah. Butuh banyak perangkat untuk menjadikan hidup beragama secara moderat. Beragama secara moderat tidak kemudian membuat orang tidak konsisten. Disatu sisi memegang teguh dasar teologi, tapi di sisi lain harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Padahal seringkali lingkungan itu bertolak belakang dengan teologi-normatif. Maka menurut Islam Moderat di situlah indahnya orang beragama yang harus dimaknai seacra luas, kalu tidak dipahami secara luas maka agama akan bergesermenjadi alat untuk menjustifikasi kesalahan-kesalahan orang lain.[[41]](#footnote-41)
2. Islam Liberal, dapat dikatakan sebagai Islam yang liberal atau bebas. Gerakan Islam liberal bertujuan untuk mebebaskan umat islam dari belenggu keterbelakangan. Islam liberal tidak setuju dengan pemberlakuan *syariat* secara formal oleh negara, memperjuangkan sekularisasi, emansipasi wanita, menyamakan agama islam dengan agama lain (*pluralism* teologi*)* , memperjuangkan demokrasi barat dan lain-lain. Islam liberal hadir untuk menyampaikan pesan wajah islam yang lain, yaitu Islam yang *non-ortodoks,* Islam yang berorientasi ke masa depan bukan ke maa silam dan mendewakan modernitas, sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernitas, yang harus disesuaikan dengan kemodrenan. Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, yang harus dilakukan bukanlah menolak, melainkan menafsirkan kembali ajaran tersebut. Di sinilah inti dari sikap dan doktrin Islam Liberal.[[42]](#footnote-42)
3. Islam Fundamental, merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk kembali pada pandangan hidup dan praktek-praktek dasar ortodoksi agama Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, yang menjadi ciri kas Islam pada masa permulaan sejarah nya. Fundamentalisme Islam muncul karena ketidakpuasan terhadap masyarakat dunia(khusunya umat Islam) yang kian menyimpang dari ajaran dan gerakan ini tidak anti sains.[[43]](#footnote-43)
4. Islam Radikal, merupakan paham keislaman atau aliran daalam Islam yang menginginkan dan mencita-citakan perubahan sosial dan politik yang sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan dengan tindak-tindak kekerasan dan drastis[[44]](#footnote-44)

Defnisi Radikalisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *radix,* yang berarti akar.[[45]](#footnote-45) Menurut Khasan Ashari dalam bukunya bahwa Radikalisme merupakan teori yang menyebutkan bahwa akivitas politik harus bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang besifat fundamental. Dalam upaya penyebaran ideologi radikal di era globalisasi ini, para kelompok radikal ini memanfaatkan penyebaran informasi melalui komunikasi internasional menyebarkan propaganda untuk memberikan ancaman bahkan mengajak masyarakat sipil bergabung dalam gerakan ini.[[46]](#footnote-46)

Pada era modern ini, memudahkan kita dalam mencapai sesuatu informasi ,aupun hal-hal yang melintasi negara, termasuk gerakan-gerakn Islam radikal yang menyebarkan pesan bahkan ancaman melalui media dan tak diragukan lagi bahwa dominasi non-*state actor*  dalam era ini cukup pesat perkembangannya. Seperti yang dikemukakan oleh Khansari tentang definisi *non-state actor* bahwa:

**“*Non-state* actor adalah konsep yang digunakan secara luas untuk menyebut aktor dalam hubungan internasional yang tidak mewakili Negara atau pemerintahan. *Non- state actor* umumnya dibagi menjadi dua kategori yaitu (1) aktor transnasional seperti organisasi non-pemerintah, media, kelompok teroris, kelompok pemberontak, organisasi kejahatan, kelompok keagaan, kelompok kepentingan dan diaspora; (2) organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari Negara-negara*.”***

Dengan ideologi tersebut, Negara Islam memberikan pengaruh terhadap perpolitikan dunia, dan menjadikan Negara Islam begitu dikenal oleh masyarakat dunia. Sehingga Muslim dari berbagai penjuru dunia terpengaruh untuk bergabung dengan Negara Islam. Menurut Jack Plano dkk dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa:

**“Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah-laku orang lain dalam cara yang dihendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (atau mencegah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan). Kemampuan pelaku mempengaruhi orang lain tergantung pada banyak faktor. Diantaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atas dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh dan derajat tuntutan penyesuaian.”**[[47]](#footnote-47)

Negara Islam memiliki tujuan untuk membentuk Negara Khilafah berlandaskan Hukum Islam (syari’ah). Khilafah seniri mempunyai pengertian secara bahasa berarti kepemimpinan. Hanya saja tujuan mulia ini tidak bersamaan dengan tindakan yang dilakukan kelompok ini. Gerakan ini disebut *Political Movement,* seperti yang dikemukakan oleh Miriiam Budiardjo dalam bukunya *Dasar- Dasar Ilmu Politik*  bahwa:

**“Suatu Gerakan merupakan kelompok atau golongan yang** **ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotaanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok yang kuat.[[48]](#footnote-48)**

Berdasarkan paparan konseptual diatas, maka penulis mencoba membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan kepada hipotetsis, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa asumsi, antara lain:

1. Gerakan politik ISIS yang berideologikan radikal ini memiliki tujuan mendirikan Negara Islam dan menggunakan bentuk serangan seperti ancaman teror untuk mencapai tujuannya.
2. Suatu kawasan dikatakan aman apabila stabilitas politik keamanannya tidak terganggu dari bahaya atau suatu ancaman baik dari dalam maupun dari luar serta aktor negara maupun non-negara sehingga stabilitas politik dan keamanannya terjamin.
3. Dengan adanya kelompok gerakan ISIS ini dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik kemanan di Indonesia maka perlu adanya tindakan pemeintah dalam menanggulangi kasus terorisme dan gerakan radikal di Indonesia.

**D.2 Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

**“Jika gerakan politik dijadikan instrument serta dukungan dari kelompok garis keras menjadi bagian dari ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah, maka kebijakan deradikalisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan konsistensi kelembagaan dalam menjaga stabilitas politik keamanan di Indonesia”**

**D.3 Operasional Variable dan Indikator (Konsep Teoritik, Empiris dan Analisis**

**Tabel 1 : Operasional Variabel Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator** **(empirik)** | **Variabel****(Analisis)** |
| Variabel BebasJika gerakan politik dijadikan instrument | 1.Adanya penyebaran ideologi ISIS di Indonesia 2.Adanya dukungan dari kelompok garis keras  | * Berita mengenai pengibaran bendera ISIS di berbagai tempat menguatkan indikasi bahwa penyebaran ideologi ISIS di Indonesia mulai meluas.

Sumber: Indonesia Larang Penyebaran Ideologi ISIS” dalam hhtp//www.bbc.co.uk/Indonesia/berita\_indonesia/2016/08/140804.html* Berita mengenai kelompok Islam yang menyatakan dukungan terhadap ISIS

Sumber: “Buku Putih Pertahanan : Mempertahankan Tanah Air memasuki Abad 21” dalam <http://www.dephan.go.id/buku_putih/> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel TerikatMaka kebijakan deradikalisasidiperlukan untuk menjaga stabilitas politik keamanan di Indonesia | 3. Adanya partisipasi masyarakat, ORMAS, dan tokoh informal4.Konsistensi kelembagaan Peemerintah | * Data mengenai dukungan ORMAS Islam terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah ) dan alim ulama

sumber: “Stop Radikalisasi” , Harian Kompas, Bandung 1 Maret 2016, hlm 26.* Berita mengenai BNPT dalam menanggulangi ancaman teror kelompok radikal

Sumber: Indonesia Larang Penyebaran Ideologi ISIS” dalam hhtp//www.bbc.co.uk/Indonesia/berita\_indonesia/2016/08/140804.html |

**D.4 Skema Kerangka Pemikiran**

Gambar 1

Skema Kerangka Pemikiran

Indonesia

Gerakan Politik Negara Islam

Penyebaran Ideologi ke seluruh Dunia

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mencegah, melindungi dari ancaman gerakan radikal dan serangan terorisme

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

**E.1 Tingkat Aanalisis**

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu adanya anggapan dasar dan kerangka konseptual yang merupakan pijakan dasar penentuan dan penulisan hipotesa. Untuk keperluan penelitian penulis mencoba mengemukakan serangkaian teori, konsep, pemikiran para pakar dalam bentuk premis mayor dan premis minor sebagai acuan ilmiah dalam mengeneralisasi pokok permasalahan dan mempunyai hubungan korelasional. Dari penjelasan tersebut untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis “startegi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman Negara Islam di Indonesia” dan unit ekplenasi “gerakan Negara Islam ” maka tingkat analisis yang dilakukan dalam tingkatan yang sama.

**E.2 Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa keejadian dan masalah berdasarkan realita. Data diorganisasikan secara sistemats untuk menggambarkan fakta-fakta atau bidang tertentu secara akurat dan cermat. Dalam pelaksanaanya metode ini tidak sebatas pengumpulan data saja, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.
2. Metode Historis Analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

**E.3 Teknik pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu usaha penghimpunan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, keteapan-ketetapan dan sumber-sumber tertulis baik secara cetak maupun elektronik lainnya.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**F.1 Lokasi Penelitian**

Dalam membantu pembuatan penelitian ini penulis telah mengambil sumber dari lembaga-lembaga yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.adapun lembaga-lemabaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Kampus I, Jln. Lengkong Besar No 68.

**F.2 Lamanya penelitian**

 Lama penelitian yang dibutuhkan penulis sekitar 6 bulan.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari masalah yang diteliti.

**BAB II GERAKAN POLITIK NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH**

**BAB III PEMABANGUNAN POLITIK KEAMANAN DI INDONESIA**

**BAB IV KEBIJAKAN DERADIKALISASI PEMERINTAH TERHADAP IDEOLOGISASI NEGARA SLAM IRAK DAN SURIAH DI INDONESIA**

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**

**TINJAUAN MENGENAI NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH**

1. **Sejarah Terbentuknya Negara Islam**

Negara Islam Iraq dan Suriah ( ISIS) terlahir dari bentuk perjuangan umat Muslim garis keras di Timur Tengah pada tahun 1990-an untuk menggulingkan pemerintahan Arab nasionalis yang secara relatif sekuler mendominasi wilayah, dan mengembalikan peraturan hukum Islam. Negara Islam bermula sebagai sebagai sebuah kelompok jihad di Iraq yang bernama *Jama’at al- Tauhid wa al-Jihad* (Monotheisme dan Jihad). Didirikan pada tahun 1999 oleh seorang muslim bernama Ahmed Fadhlil Nazar al- Khalaylah, yang dikenal secara internasional Abu Musab al Zarqawi. Karirnya dalam berjihad tidak hanya menerangi latar belakang gerakan negara Islam, tetapi menerangi juga tujuan jihad muslim radikal pada umumnya.[[49]](#footnote-49)

Jihad pertama yang dilakukan Zarqawi pada saat bertempur melawan Uni Soviet di Afganistan pada tahun 1980-an, tetapi di sana dia hanya melihat ada sedikit tindakan, dan pada tahun 1992 dia kembali ke Yordania untuk *Jun al Sham*  (Prajurit Levant), yang memberikan pertanda kepada gerakan NI dalam dedikasinya untuk menggulingkan pemerintahan yang sekuler (Yordania) dan mempersatukan sebuah wilayah yang lebih besar (Levant) dalam satu negara Islam. Zarqawi tertangkap setelah sebuah tempat penyimpanan senjata ditemukan di rumahnya. Zarqawi dijatuhi hukuman penjara lima belas tahun pada bulan Maret 1994. Pada akhir sebuah persidangan, Zarqawi menunjukan penghinaan terhadap pemerintahan yang tidak memerintah berdasarkan hukum Islam dengan menyerahkan hakim secarik kertas berisi tulisan yang telah ditulis oleh dirinya dan dalam kertas tersebut tertulis nama raja Yordania dan nama hakim itu sendiri sebagai terdakwa.[[50]](#footnote-50)

 Pada saat di dalam penjara, Zarqawi menjadi pemmpin sebuah kelompok Muslim yang disiplin ketat dan fanatic. Kelompok ini dikhususkan kepada siapa saja yang mau menurutinya. Sesama jihadis yang mengetahui Zarqawi pada saat tersebut ingat bahwa dia “terkenal mencitntai saudara-saudaranya dalam keimanan kepada Tuhan lebih dari keabat-kerabatnya”.[[51]](#footnote-51)

 Pada bulan Mei 1999, Zarqawi dibebaskan dari penjara setelah menjalani hanya sepertiga dari hukumannya, di bawah amnesti umum yang diberikan oleh Raja Yordania, Raja Abdullah. Kebijakan amnesti tersebut langsung menuju keraguan ketika Zarqawi terlibat dalam skema jihad yang dikenal sebagai ‘Millenium Plot’. Millenium Plot adalah serangkaian rencana serangan bom yang menjadikan sebuah hotel mewah dan tempat-temoat lainnya yang sering dikunjungi sebagai sasarannya. Rencana tersebut digagalkan, Zarqawi terbang ke Pakistan dan, dimana dia mendirikan sebuah gerakan bernama *Jama’at al- Tawhid wa al Jihad* (Motheisme dan Jihad). Di afganistan Zarqawi bertemu dengan bin Laden, yang memutuskan memberikan dana untuk sebuah kamp pelatihan jihad Zarqawi di Herat, dimana dia melatih jihadis dari Yordania, Suriah, wilayah Palestina dan tempat lainnya untuk beraksi di belahan dunia.[[52]](#footnote-52)

 Setakah kejadian 11 September, Zarqawi dan orang-oangnya menyebrang dari Afganistan ke Iran, di mana mereka memungkinkan untuk beroperasi hingga bulan April 2002. Pada saat tersebut, delapan jihadis Zarqawi diketahui keberadaanya di Jerman, berencana untuk melakukan Jihad pembunuhan masal terhadap target otang Yahudi. Zarqawi dideportasi dari Iran atas temuan tersebut dan pindah ke Irak dimana dia mengantisipasi bahwa serangan Amerika akan terjadi. Dia melatih kelompok *Jama’at al Tawhid wa al Jihad* untuk melatih sebah pasukan jihad yang anti Amerika dan memposisikan dirinya sebagai seseorang pemimpin dan pedoman bagi seluruh jihadis, dari seluruh dunia yang muali mengalir masuk ke Iraq untuk melawan Amerika.[[53]](#footnote-53)

 Popularitas Zarqawi di dunia Internasional mulai meningkat. Dirinya menjadi terkenal sebagai seorang pionir dari media jihad yang dimana gerakan politik Negara Islam saat ini menjadi ditakuti dan dibenci dan secara pribadi bertanggungjawab terhadap alah satu dari video pemenggalan kepala pertama yang dipasang di internet, dan mendapatkan perthatian Barat, seorang sandera orang amerika bernama Nichola Berg menjadi korban pada bulan Mei 2004.[[54]](#footnote-54)

 Beberapa bulan kemudian, kelompok Zarqawi juga memfilmkan dan mendistribusikan pemenggalan dua orang Amerika lainnya, kontraktor Eugene Amstrong dan Jack Hensley, Zarqawi secara moral bertanggungjawab terhadap banyak pembunuhan, tetapi pada kasus Berg dan Amastrong tampaknya dia benar-benar memegang senjata untuk membunuh mereka juga. Merajuk kepada video judul Nicholas Berg dan pengumuman online *Jama’at al Tawhid wa a Jihad* mengenai pembunuhan Amsterong, Zarqawi sendiri yang terlibat sebagai sebagai sosok bertopeng memtotong kepala korban mereka dengan menggunakan pisau.[[55]](#footnote-55)

Pada tanggal 17 Oktober 2004, dengan popularitas yang tengah memuncak, Zarqawi menyatakan sumpah kesetiaan dirinya dan gerakannya kepada Osama bin Laden dan mengganti nama kelompoknya menjadi Tanzim Qai’dat al Jihad fi Bilad al Rafidayn, al Qaeda di Daratan Dua Sungai. Tidak lama lagi gerakan ini menjadi popular dengan naman al Qaeda di Irak (AQI)[[56]](#footnote-56)

Deklarasi persekutuan kelompok Zarqawi dengan al Qaeda menitik beratkan pentingnya persatuan Mulim, sesuatu yang dapat menjadi suatu prioritas Negara Islam.[[57]](#footnote-57)

Pada saat tersebut, rasa ketidak maafan Zarqawi merangkul teror sebagai sebuah taktik perang yang teah membuatnya menjadi pahlawan virtual diantara jihadis di seluru dunia. Zarqawi menyaingi pemimpin baru nya (Osama bin Laden) sebagai teroris jihad paling dikenal di dunia. Amerika menganggap bahwa Zarqawi merupakan orang penting dan kepalanya dihargai 25 juta dollar US, harga yang sama dengan kepala Osama bin Laden[[58]](#footnote-58)

Akhinya Zarqawi terbunuh dalam serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat pada tanggal 7 Juni 2006. Tidak ada kelompok jihad yang yang bergantung terhadap pemimpin yang karismatik, bahkan salahsatunya secara fanatic mengabdikan diri kepada gerakannya dan memungkinkan untuk membangkitkan yang lain untuk bergabung sebagai Zarqawi. Gerakan tersebut seperti yang terlihat dikemudikan secara ideologi.[[59]](#footnote-59) Sehingga kelompok Zarqawi tetap hidup di bawah kepemimpinan Abu Hamzah al Mujahir, orang mesir yang dekat dengan Ayman al Zawahiri[[60]](#footnote-60)

Pada tanggal 13 Oktober 2006, al Qaeda di Daratan Dua Sungai merekonstituisi dirinya sebagai the Islamic State of Iraq (ISI) atau negara Islam di Irak (NII)[[61]](#footnote-61) NNI dipimpinoleh Abu Omar al Baghdadi, Abu Hamzah dan Abu Omar terbunuh secara bersamaan dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010.[[62]](#footnote-62)

Gerakan ini tetap lanjut untuk mengusik tentara Ameika di Iraq, menunggu saatnya hingga hari yang tidak terhindarkan ketika Amerika akan pergi. Hari tersebut tiba pada tanggal 14 Desember 2011, ketika Barck Obama berbicara di Fort Bragg, Karolina Utara, kepada beberapa tentara terakhir yang tiba di tanah air setelah dari Irak. Berbicara mengenai mengakhiri perang dan memanggil pulang semua tentara Amerika adalah sebuah “Momentum Kesuksesan”[[63]](#footnote-63)

Para jihadis gerakan Negara Islam di Iraq tidak setuju bahwa perang telah berakhir. Mereka tidak pergi melarikan diri, melainkan mereka memperbesar gerakan. Mereka mengambil kesempatan dalam pemberontakan terhadap diktaktor Suriah Bashar al Assad dan mereka pindah ke negara tetangga tersebut . pada 9 April 2013, mereka mmengganti nama menjadi The Islamic State of Iraq and The Levenant/ al Sham (ISIS) ATAU Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) . Kemudian mereka mengambil keuntungan dari kesuksesan pemberontak Sunni di Suriah ( yang dimana Obama meminta Kongres untuk mengizinkan bantuan militer pada musim panas tahun 2013) dan kelemahan rezim Syiah di Baghdad untk mengambil alih wilayah Suriah dan Irak. Assad dan pemerintah Iraq di Baghdad tidak berdaya untuk menghentikan mereka.[[64]](#footnote-64)

Perpisahan dengan al Qaeda tidak memperlambat gerakan NIIS. Pada tanggal 10 Juni 2014, jihadis NIIS memposting secara online foto pembongkaran perbatasan Suriah- Irak dengan menggunakan buldoser. NIIS tiak mengakui batas wilayah Suriah dan Irak, mereka menganggap ini sebagai sebuah konstruksi palsu pihak barat dan melihat hal ini sebagai symbol bagaimana non – muslim (barat) telah menindas umat muslim di dunia, memisahkan mereka ked lam negara-negara palsu dan menghancurkan persatuaan suci yang telah mereka nikmati di bawah satu kepemimpinan politik, Khalifah.[[65]](#footnote-65)

Penghancuran batas tersebut merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa umat muslim seharusnya bersatu dalam satu negara di bawah satu pemerintahan, dan sekalinya batas wilayah Suriah-Irak dihilangkan, langkah selanjutnya pada dasarnya tidak dapat terhindarkan. Pada tanggal 29 Juni 2014, NIIS mendeklarasikan formasi khilafah baru dan menghilangkan setengah dari namanya, dan kali ini hanya bernama Islamic State (IS) Negara Islam( NI). Nama baru terebut adalah sebuah penegasan kepada kesetiaan keseluruhan umat Islam di Seluruh Dunia. Negara Islam menegaskan bahwa mereka adalah pemerintahan Islam di dunia dan menuntun loyalitas seluruh Muslim. Kebangkitan Khilafah adalah kembalinya istilah pemerintahan pada masa kejayaan Islam dari kematian Nabi Muhammad SAW melewati masa keemasan Islam hingga kehancuran Turki Ottoman setelah berakhirnya PerangDunia I, ketika umat muslim dipimpin oleh seorang khalifah penerus Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik Islam.[[66]](#footnote-66) Salah satu aktor yang memimpin gerakan ini bernama , Abu Bakar al Baghdadi adalah seorang pemimpin Negara Islam sejak tahun 2010 dan menjadi Khalifah yang baru pada bulan Juni 2014 dengan deklarasi khilafah.[[67]](#footnote-67) Ibrahim Awad al Badri al Samarrai atau dikenal sebagai Abu Bakar al Baghdadi lahir di Samarra pada tahun 1971. Keluarganya tidaklah kaya dan beberapa kerabatnya adalah ulama. Sebelum pindah ke Fallujah, dia belajar di Universitas Islam di Baghdad, tinggal di lingkungan warga miskin yang berlokasi jauh dari pusat kota dan bertindak sebagai asisten imam di Masjid lokal. Orang-orang yang mengaku sebagai teman sekelasnya menunjukan bahwa dia adalah *outsider* (orang luar) di sekolah, tidak bagus dalam bidang apapun kecuali sepak bola, yang merupakan satu-satunya kegiatan yang dia ikuti dengan teman-temanya. Dia tidak tercatat oleh siapa pun sebagai seseorang yang memiliki charisma atau menunjukan atau menunjukan kualitas kepemimpinan.[[68]](#footnote-68)

Negara Islam mengklaim bahwa al Baghdadi adalah seorang komandan militer yang aktif dan efektif, memimpin pasukannya di pertempuran dan terluka sebagai hasilnya. Klaim tersebut sepertinya tidak mungkin. Bukan hanya al Baghdadi tidak memiliki latar belakang atau pengalaman militer, dia juga secara intens hati-hati akan keamananya dan sebelum kemunculannya di Masjid kota Mosul pada tanggal 4 Juli 2004, hanya segelintir orang saja mengetahui dirinnya seperti apa. Ketika para komandan yang tingkatannya berada di bawah kepemimpinannya dipanggil untuk bertemu dengannya, dikatakan bahwa mereka diberitahu bahwa al Baghdadi eksis dalam gerakan ini tsnpa memperlihatkan identitasnya secara spesifik. Lokasi keberadaan Abu Bakar al Baghdadi tidak diketahui, tetapi dia diduga memimpin Negara Islam dari kota Raqqa di Suriah, diduga keberadaanya di kota Mosul Irak.[[69]](#footnote-69)

1. **Eksistensi Perjuangan Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah**

Gerakan politik Negara Islam merupakan kelompok teroris terkaya dan tersukses sepanjang sejarah di dunia. Gerakan ini memungkinkan kendali atas wilayah untuk periode yang panjang. Gerakan ini akan memberikan contoh modern bagaimana sekelompok prajurit dan preman mampu membuat transisi dari perang dan intimidasi kekerasan menuju pemerintahan yang stabil.[[70]](#footnote-70)

1. **Gerakan Negara Islam Memperoleh Kontrol Wilayah**

Perang Iraq yang menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasaan dan instalasi rezim Syiah yang lemah di Baghdad meninggalkan Irak dalam banyak kekacauan. Rezim Baghdad pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari rezim Syiah Iran, tetapi banyak wilayah Sunni yang terdapat di Iraq tidak berada di bawah kontrol mereka, dan jumlah kaum Sunni yang signifikan memiliki rasa dendam yang sangat dalam terhadap Syiah yang mendominasi rezim. Sementara itu, “*Arab Spring”* pemberontakan yang dilakukan oleh pro-Syiah atau hukum Islam memberontak melawan rezim sekuler di Tunisia Mesir, Libya dan pada akhirnya Suriah. Ketika Assad berdiri jauh lebih tegak dari pada rekan-rekannya Ben Ali di Tunisia dan Mubarok di Mesir, Suriah dilanda dalam perang sipil yang besar, dengan Iran mendukung rezim Al awite di Damaskus ketika kaum Sunni di seluruh negeri bersekutu dengan berbagai kelompok jihad yang bertekat untuk menggulingkan Assad dan menggantikannya dengan rezim Islam di Suriah. Penarikan pasukan Amerika dari Irak oleh Barack Obama dianggap tergesa-gesa.dan buruk karena meninggalkan kekosongan yng memungkinkan kelompok Sunni untuk dapat mengeksploitasi.[[71]](#footnote-71)

1. **Rampasan Perang**

Rampasan perang membantu Negara Islam untuk memperoleh kontrol dari beberapa sumber kekayaan yang besar dan dapat dipercaya, dan akhirnya menjadikan mereka sebagai kelompok jihad teror terkaya di dunia. Negara Islam menjarah hampir 500 juta dolar dari sebuah bank di kota Mosul. Penaklukan yang dilakukan Negara Islam mencangkup jutaan dolar seharga amunisi dan perlengkapan perang Amerika yang diambil dari tentara Irak. Di Mosul sendiri, gerakan Negara Islam dilaporkan mencuri dua ribu tiga ratus Humvee. Pada saat runtuhnya kota Ramadi, ibukota provinsi Anbar pada bulai Mei 2015, Pentagon mengakui bahwa pasukan Irak meninggalkan setengah lusin tank, jumlah yang sama dengan jumlah yang lebih banyak sekitar 100 kendaraan seperti Humvee kepada Negara Islam.[[72]](#footnote-72)

1. **Minyak Negara Islam**

Theodore Karasik, kepala peneliti di INEGMA Dubai, menjelaskan bahwa rezim Assad tidak siap atas konsentrasi serangan gerakan Negara Islam terhdap kilang minyak di Suriah pada bulan Juli 2004. Negara Islam merebut kirang minyak tersebut bertujuan untuk mendirikan suatu negara. Penaklukan tersebut merupakan bagian dari rencana untuk membangun sistem ekonomi sendiri. Rencana mereka berhasil dan Negara Islam mendapatkan satu juta dolar dari Irak keuntungan minyak. Jika negara Islam mampu mengambil alih kilang minyak di seluruh Suriah dan Irak, mereka memperoleh pendapatan sekitar seratus juta dolar per bulan. Negara Islam menjual minyak pada harga yang jauh lebih murah dari harga standar ketentuan OPEC. Banyaknya pihak yang tidak tahan untuk membelinya di pasar gelap. Mereka menjual minyak seharga 30 dolar per barel, sedangkan standar OPEC internasional untuk harga minyak lebih dari 100 dolar per barel. Minyak tersebut dibawa melewati Turki dan Suriah, dan dijual ke pedagang pasar gelap yang beroperasi di seluruh wilayah Levant.[[73]](#footnote-73)

1. **Donasi**

Donasi yang sangat banyak. Negara Islam menerima donasi sebesar 40 juta dolar pada tahun 2013 dan 2014. Donasi tersebut tidak hanya berasal dari individu yang kaya, bahkan berasal juga dari pemerintah Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait. Lori Plotkin Boghart dari Washington Institute program Kebjakan Timur Dekat mengatakan bahwa “Qatar dan Kuwait terus berlanjut sebagai dua titik masalah pada persoalan pendanaan penegakan kontrateroris”. Karena para pemodal dari negara-negara tersebut adalah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh politik disana[[74]](#footnote-74)

Islam menjadi alas an motif dari pendaan-pendanaan misterius tersebut. Kawasan Timur Tenggah yang memiliki kekayaan minyak penuh dengan orang-orang yang sangat kaya, membaca Al Quran yang sama dengan yang dibaca di Negara Islam, dan mereka siap menggunakan kekayaan mereka untuk pendanaan jihad atas nama Allah. Mereka tidak melihat Negara Islam sebagai sebuah gerakan yang memperumit dan merampas ajaran damai agama mereka, efek negative dari mereka merupakan konsumsi untuk pihak barat. Secara diam-diam dengan menggunakan kekuatan penuh keuangan mereka, mereka menunjukan bahwa dalam kebalikannya mereka melihat Negara Islam sebaai sebuah penjelmaan ajaran Islam yang benar dan beriman.[[75]](#footnote-75)

1. **Uang Tebusan**

Negara Islam menuntut $1000.000.000 untuk pembebasan seorang wartawan bernama Jmaes Foley. Ketika pembayaran tidak kunjung datang, Foley dipenggal kepalanya. Kemudian Negara Islam menuntut $200.000.000 kepada pemerintah Jepang untuk pembebasan Haruna Yukawa, ketika batas waktu telah habis dengan tidak ada respon dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Negara Islam memenggal Yukawa dan merilis sebuah rekaman suara yang mengaku memiliki sandera orang Jepang bernama Kenji Goto. Pembicaraan dalam rekaman tersebut megatakan, “Mereka tidak lagi menginginkan uang anda antarkan kakak perempuan mereka dari pemerintah Yordania, dan saya akan dibebaskan secepatnya. Saya untuk dia. Jangan biarkan ini menjadi kata-kata terakhir saya yang anda dengar. Jangan biarkan Abbe huga membunuh saya”. Kakak perempuan mereka dari pemerintahan Yordania adalah Sajida Mubarak al Rishwi, seorang muslimah yang dipenjara setelah gagal melakukan bunuh diri pada tahun 2005. Ketika pemerintah Yordania gagal untuk membebaskannya, Negara Islam Goto.[[76]](#footnote-76)

Dalam dua kasus terebut, Negara Islam tidak mendapatkan uang tebusan yang mereka tuntut. Bagaimanapun, dalam kesempatan yang lain, mereka menerima sedikit tebusan dan tidak mempublikasikannyakarena dapat mempermalukan orang-orang yang mebayar tebusan tersebut. Tuntutan tebusan tersebut menjadi lebih sukses. Departemen Keuangan memperkirakan bahwa pada tahun2014 saja Negara Islam mendapatkan $20 juta dari pembayaran tebusan. Pendapatan dari pembayaran-pembayaran tersebut merupakan hasil dari tebusan sandera-sandera yang tiddak mendapatkan perhatian media. Uang tebusan menghasilkan banyak 20 persen dari total keseluruhan pendapatan Negara Islam. Negara Islam diperkirakan memperoleh pendapatan sebesar enam juta dolar sehari.[[77]](#footnote-77)

1. **Orang-Orang dari Berbagai Belahan Dunia Bergabung dengan Gerakan Negara Islam**

Kebangkitan gerakan politik Negara Islam di Perang Sipil Suriah dan kekacauan setelah invansi terhadap Irak tetap menjadi fenomena lokal dan regional, dengan mayoritas aanggota-anggota baru yang datang dari negara-negara Arab. Ornag-orang yang berasal dari Tunisia, Arab Saudi dan Yordania adalah jumlah yang paling besar ketimbnag orang-orang yang berasal dari negara lain yang bergabung dengan gerakan Negara Islam untuk menarik orang-orang tersebut melalui social media. Seringkali orang-orang tersebut yang telah tiba di Irak dan Suriah selalu menjngkau teman teman bahkan kerabat-kerabat mereka dengan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama. Motivasi utama orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk

Bergabung dengan gerakan Negara Islam adalah karena tujuan yang sama, untuk berpetualang dan menjalin persahabatan.[[78]](#footnote-78)

Bagi orang-orang yang telah bergabung dengan gerakan Negara Islam sangtalah sulit untuk keluar dari gerakan tersebut. Seiiring berjalan nya waktu, terdapat peningkatan jumlah individu yang kembali ke negara asalnya dari pertempuran di Suriah dan Irak. Motivasi mereka untuk meninggalkan gerakan Negara Islam sangatlah bervariasi, beberapa ada yang merasa cukup dengan kekerasan, beberapa merasa kecewa dengan Negara Islam dan kepemimpinannya, dan yang lainnya kemungkinan memutuskan untuk mengejar tujuan-tujuan mereka di tempat lain. Berikut adalah table jumlah orang-orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam yang berasal dari the Soufan Group yang merupakan lembaga analisa yang menyediakan layanan strategis keamanan intelejen bagi pemerintah dan organisasi organisasi multinasional.[[79]](#footnote-79)

1. **Kedudukan dan Peran Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah**
2. **Peraturan Khusus Untuk Orang- Orang Non- Muslim**

Sebagian besar umat Non-Muslim di daerah kekuasaan Negara Islam telah mengungsi atau dibunuh. Semua yang tersisa sekarang adalah beberapa umat Non-Muslim yang cacat atau sakit-sakitan, dan kondisi mereka semakin memburuk. Akan tetapi, mereka yang masih tinggal telah mematuhi hukum Syariah. Peraturan Negara Islam mengamanatkan penaklukan umat Non-Muslim secara terus terang dalam hukum tradisional Islam. Di dalam hukum Syariah, umat Non-Muslim diizinkan untuk tinggal di Neagara Islam sebagai seorang “dhimmis’ (orang-orang yang dilindungi) jika hanya mereka tunduk terhadap rezim yang berkuasa. Jika umat Non-Muslim tidak mematuhi peraturan Negara Islam, mereka tidak lagi ‘dilindungi’, dan hubungan antara mereka dan pemerintah Negara Islam kembali ke keadaan sebelumnya suatu status dari permusuhan yang keras. Umat Non-Muslim di dalam Negara Islam dilarang untuk:

1. Memperlihatka kegiatan keagamaan mereka di muka publik (seluruh peribadatan Non-Muslim dilakukan di belakang pintu yang tertutup rapat-rapat.)
2. Membunyikan lonceng Gereja
3. Memperlihatkan salib di muka publik, termasuk pasar, wilayah lain di mana umat Islam dan Non-Muslim dapat berhubungan langsung
4. Berdoa sangat keras, sehingga umat muslim dapat mendengar doa-doa mereka
5. Mendirikan Gereja yang baru atau memperbaiki Gereja yang tua
6. Membuat lelucon terhadap umat Muslim atau Islam
7. Mencoba mencegah siapapun yang pindah agama dari Non-Muslim ke Islam.[[80]](#footnote-80)

Peraturan-peraturan tersebut juga secara terperinci melarang umat Non- Muslim untuk mengangkat senjata dan pengkhianatan melawan Negara Islam tersebut akan dijatuhi hukuman mati. Tidak ada satupun dari peraturan-peraturan ini yang tidak wajib.[[81]](#footnote-81)

1. **Struktur Kepemimpinan Negara Islam**

**Tabel 2 : Data Pemimpin Deparetemen Negara Islam[[82]](#footnote-82)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** |
| Abu Bakar al-Baghdadi | Khalifah |
| Abu Muslim al-Turkmani (terbunuh pada bulan Desember 2014) | Wakil Khalifah, Pengawas provinsi Irak |
| Abu Ali al-Anbari | Wakil Khalifah, Pengawas provinsi Suriah |
| Abu Suleiman | Menteri Perang |
| Abu Wahib | Komandan Militer Senior |
| Umar al-Shisani | Pemimpin Operasi Militer di Suriah |
| Abu Salah  | Menteri Keuangan |
| Abu Hajar al-Assafi | Menteri Koordinasi Umum |
| Abu Abd al-Kadir | Menteri Manajemen Umum |
| Abu Saji | Menteri Layanan Sosial |
| Abu Louay (alias Abu Ali) | Menteri Keamanan Umum |
| Abu Maysara | Gubernur Baghdad |
| Abu Abdul Salem (Abu Mohammed alSweidawi) | Gubernur Anbar dan Kepala Dewan Militer |
| Abu Jurnas | Gubernur “Provinsi Perbatasan” |
| Abu Fatima (Ahmed Mohsen Khalal alJuhayshi) | Gubernur Efrat Tengah dan Selatan |
| Abu Fatima (Naima Abd al-Naif al-Jouburi) | Gubernur Kirkuk |
| Abu Luqman | Gubernur Raqqa Abu |
| Abu Atheer al-Absi | Gubernur Aleppo |
| Haji Abd al-Nasir | Gubernur Deir ez Zour |
| Abu Shuayb al-Masri | Gubernur Homs |
| Abu Nabil | Gubernur Salaheddin |
| Abu Muhammad al-Adnani (Taha Sobhi Falaha) | Kepala Juru Bicara  |
| Ahmad Abousamra | Kepala Operasi Media |
| Abu Kassem | Menteri Pejuang Luar Negeri dan Pelaku Bom Bunuh Diri |
| Abu Hummam al-Athari | Pejabat Syariah |
| Abu Suja | Koordinator untuk urusan Syahid dan Wanita |
| Abu Kifah | Menteri Bahan Peledak |
| Abu Sima | Menteri Persenjataan |
| Abu Mohammed (Bashar Ismail al-Hamdani) | Menteri Tahanan |

1. **Generasi Penerus**

Antara bulan Januari dan akhir Maret 2015, organisasi pemuda Negara Islam di Iraq dan Suriah dimasuki setidakny empat ratus anak-anak Suriah dibawah usia delapan balas tahun, memberikan mereka pelatihan bagaimana menembak senjata sebagaimana juga doktrinisasi secara intensif cara pandang dari sudut Negara Islam. Sebuah video Negara Islam yang dipublikasikan pada bulan Maret 2015 memperlihatkan salah stu dari anak-anak tersebut menembak dan membunuh seseorang yang dituduh sebagai mata-mata.[[83]](#footnote-83)

Negara Khalifah telah menyeruukan kepada seluruh orang tua Muslim di seluruh dunia untuk mengirimkan anak-anak mereka ke Negara Islam untuk pelatihan jihad. Program anak-anak khalifah terlihat seperti sebuah program yang dimana jika Negara Islam dikalahkan atau dibenrantas, maka bencana susulan akan dirasakan seluruh dunia dalam tahun yang akan datang.[[84]](#footnote-84)

1. **Pengantin Jihadis**

Negara Islam tidak hanya menarik perhatian pemuda-pemuda Muslim, tetapi juga ratusan wanita Muslim dari seluruh dunia. Pememrintah Inggris memperkirakan sepuluh persen dari umat Muslim dari Inggris yang berangkat ke Negara Islam adalah wanita dan jumlah perbandingan yang sama, wanita yang berangkat ke Negara Islam berasal dari Benua Eropa, Australia, dan Asia. Para wanita yang bergabung dengan Negara Islam tersebut menjadi istri-istri dari pejuang jihad. Sedikit jumlah wanita yang mengangkat senjata dan bertempur untuk Negara Islam.[[85]](#footnote-85)

1. **Pengingkaran Jihadis Dunia Dengan Negara Islam**

Negara Islam saat ini memimpin persekutuah kelompok jihad diseluruh dunia. Konsep Khalifah yang telah dibangun dan deklrasi Abu Bakar al Baghdadi sebagai pemimpin dunia seluruh dunia, membuat banyak kelompok-kelompok jihad di seluruh dunia menerimanya sebagai khalifah dengan menyatakan persekutuan ‘bayat’ kepadanya atau menyatakan dukungan mereka terhadap jihad Negara Islam[[86]](#footnote-86)

**Tabel 3: Data Kelompok Jihad yang Mendukung Negara Islam.[[87]](#footnote-87)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Kelompok Jihad** | **Negara** |
| Ansar Tawhid (Para pendukung Monoteisme Islam) di Daratan Hind | Afganistan |
| Al-Tawhid (Monoteisme Islam) Batalyon | Afganistan |
| Provinsi Khorasan | Afganistan& Pakistan |
| Jund al-Khilafah (Tentara Khilafah) di Daratan Aljazair | Al Jazair |
| Jund al-Khilafah (Tentara Khilafah) di Daratan Aljazair | Mesir |
| Ansar al-Tawhid di Daratan Hind | India |
| Mujahidin (Pejuang Jihad) Indonesia Timur | Indonesia |
| Ansar al-Islam | Irak |
| Provinsi Al-Jazeera | Irak |
| Ahrar al-Sunna (Kebebasan Sunni) di Brigade Baalbek | Libanon |
| Ansar al-Sharia | Libya |
| Dewan Syura Pemuda Islam | Libya |
| Provinsi Tripoli | Libya |
| Provinsi Fezzan | Libya |
| Provinsi Barqa | Libya |
| Boko Haram | Nigeria |
| Gerakan Khilafah dan Jihad | Pakistan |
| Media Abtalul Islam | Pakistan |
| Tehrik-e-Taliban Pakistan (Taliban Pakistan | Pakistan |
| Gerakan Islam Uzbekistan | Afganistan dan Pakistan |
| Pendukung Negara Islam di Beit al-Maqdis | Wilayah Palestina |
| Dewan Syura Mujahidin di Environ Yerusalem | Wilayah Palestina |
| Negara Islam di Gaza | Wilayah Palestina |
| Abu Sayyaf | Filipina |
| Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro | Filipina |
| Ansar al-Khilafah | Filipina |
| Mujahidin di Semenanjung Arabia | Saudi Arabia |
| Sahabat Angkatan Darat (Army of the Companions) | Suriah |
| al-Qaeda di Semenanjung Arabia | Yaman |
| Kegubernuran Dhamar | Yaman |
| Kegubernuran Sana‟a | Yaman |
| Pendukung Negara Islam di Yaman | Yaman |

1. **Konsep Takfir ISIS**

Takfir yang dalam bahasa Indonesia disebut pengkafiran merupakan sebuah konsep yang memvonis seseorang dengan sebutan kafir, yaitu orang yang keluar dari Islam atau yang berkeyakinan di luar garis Islam. Konsep takfir dalam al-Qur’an ditujukan pada siapa saja yang dengan jelas melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Terutama terhadap kaum musyrik (kaum yang menyekutukan Allah dengan yang lain) di Mekkah, al-Qur‟an dengan tegas menyebut mereka kafir.[[88]](#footnote-88)

Konsep takfir ISIS ini menganggap semua pihak yang tidak sepaham dengan mereka dan ingin menghalangi gerakan mereka maka akan dijadikan musuh mereka dan di vonis kafir. Takfi > r merupakan faktor ideologi yang menyebabkan kemunculan ISIS. ISIS menganggap pemerintahan Iraq yang kini di pimpin oleh Bashar al-Assad telah keluar dari koridor Islam. ISIS mengatakan bahwasannya al-Assad telah menanamkan ideologi Barat dalam pemerintahannya melalui hubungannya dengan para komunis yang mereka anggap ingin menghancurkan Islam. Karena hal inilah ISIS menganggap pemerintahan Bashar al-Assad telah kafir dan harus di perangi.[[89]](#footnote-89)

Dalam memperjuangkan gagasannya, ISIS tidak segan untuk

menggunakan kerasan dan teror terhadap siapa saja, baik umat muslim yang tidak sepaham. Kekerasan itu bahkan dipertontonkan di hadapan publik, seperti penyembelihan, pembakaran hidup-hidup, penembakan dan lain sebagainya, dan itu mereka lakukan atas nama Islam. Padahal, apa yang mereka lakukan, tidak sejalan dengan Islam yang memuliakan manusia.[[90]](#footnote-90)\

Ideologi jihadisme ISIS berikutnya adalah khilafah Islam, sebuah paham yang sudah sangat populer di kalangan umat Muslim, tetapi dikemas kembali oleh ISIS secara brutal melalui kekerasan. Di dunia ini terdapat banyak paham khilafah, termasuk diantaranya sebagaimana diusung oleh kelompok Hizbut Tahrir. Namun ideologi khila fah yang dianut keduanya bertumpu pada metode yang berbeda. Jika kelompok Hizbut Tahrir, mengusung ideologi khilafah melalui cara-cara damai, maka ISIS mengusungnya melalui cara-cara kekerasan yang sangat keji.[[91]](#footnote-91)

1. **Periodesasi Kebangkitan Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah**

Negara Islam ingin mengambil alih semua apa yang mereka lihat sebagai dunia Islam. Setelah mendeklarasikan kekhalifahannya, mereka berencana untuk melawan seluruh dunia dan menginginkan seluruh dunia berada di bawah kekuasaanya.[[92]](#footnote-92)

Abu musab al Zarqawi mendirikan kelompok teroris yang berubah menjadi Negara Islam, pada tahun 1996 menjelaskan Program Tujuh Langkah yang akan membawa kemenangan Muslim pada tahun 2020, seperti yang diterangkan di bawah berikut:

1. **Tahap Pertama “Kebangkitan”**

Tahap ini telah dilakukan dan berlangsung dari 2000 hingga 2003, atau lebih tepatnya dari serangan teroris 11 September 2001 di New York dan Washington untuk jatuhnya Baghdad pada tahun 2003. Tujuan dari serangan 9/11 adalah untuk memprovokasi Amerika Serikat dan menyatakan perang terhadap dunia Islam dan dengan demikian “kebangkitan” Muslim dimulai.

Tahap peratama oleh para ahli strategi dan dalang di balik al Qaeda dinilai sukses besar. Medan pertempuran dibuka dan Amerika begitupun sekutunya menjadi lebih dekat dan menjadi target yang mudah. Jaringan terorisme dilaporan puas karena pesannya dapat didengar dimana-mana.[[93]](#footnote-93)

1. **Tahap Kedua “Mata Terbuka”**

Tahap ini berlangsung sampai 2006. Teroris berharap untuk membuat konspirasi Barat menyadari akan masyarakat Islam. Hal ini adalah fase dimana al Qaeda menginginkan suatu organisasi untuk berkembang menjadi sebuah gerakan. Merekrut para pemuda gencar dilakukan pada periode ini. Irak menjadi pusat untuk semua operasi global, dengan sebuah tentara yang mengatu disana dan basis di negara-negara Arab lainnya.[[94]](#footnote-94)

1. **Tahap Ketiga “Membangundan Pendirian”**

Tahap ini berlangsung dari tahun 2007 hingga 2010. “Akan berfokus pada Suriah” para pejuang disiapkan dan beberapa tinggal di Irak. Al Qaeda berharap bahwa serangan-serangan akan membantu kelompok teroris menjadi organisasi yang diakui.[[95]](#footnote-95)

1. **Tahap Keempat antara 2010 dan 2013**

Al Qaeda bertujuan untuk membawa keruntuhan terhadap pemerintah Arab yang dibencinya. Perkiraan tersebut adalah hilangnya kekuasaan rezim dan menyebabkan pertumbuhan yang stabil dalam kekuatan di al Qaeda. Pada saat yang sama, serangan akan dilakukan terhadap pemasok minyak dan ekonomi Amerika Serikat akan menjadi target dengan menggunakan teroris *cyber*.[[96]](#footnote-96)

1. **Tahap Kelima**

Tahap ini akan menjadi titik dimana Negara Islam atau Khilafah dideklarasikan. Rencananya antara tahun 2013 dan 2016, pengaruh Barat di dunia Islam akan berkurang dan Israel melemah yang membuat perlawanan mereka tidak akan ditakuti. Al qaeda berharap bahwa pada saat itu Negara Islam akan mampu membawa sebuah tatanan dunia baru.[[97]](#footnote-97)

1. **Tahap Keenam**

Dipercaya bahwa dari tahun 2016 dan seterusnya aka nada periode “konfrontasi total”. Begitu kekhalifahan telah dinyatakan, tentara Islam akan menghasut sebuah pertarungan antara orang-orang beriman dan non Muslim.[[98]](#footnote-98)

1. **Tahap Ketujuh “Kemenangan Total”**

Di mata teroris, karena seluruh dunia akan terpukul oleh “satu dan setengah miliar Muslim”, kekhalifahanakan berhasil. Periode ini harus selesai pada tahun 2020, walaupun perang seharusnya tidak berlangsung lebih dari dua tahun[[99]](#footnote-99)

proto pembangunan Negara di dalamnya sesuai dengan visi ideologisnya. Kemudian, Negara Islam akan memperluas ke wilayah yang lebih dekat dengan menyerang musuh terdekat, Jabhat al-Nusra dan tentara revolusioner Suriah ke rezim Assad dan pemerintah Irak. Fokus ini dimulai secara bertahap dari musim panas 2014, khususnya setelah serangan udara Amerika Serikat pada Agustus 2014.Sebelum tahun 2015, strategi Negara Islam terutama difokuskan pada merebut wilayah di Timur Tengah, membersihkannya juga mengendalikannya dan kemudian proto pembangunan Negara di dalamnya sesuai dengan visi ideologisnya. Kemudian, Negara Islam akan memperluas ke wilayah yang lebih dekat dengan menyerang musuh terdekat, Jabhat al-Nusra dan tentara revolusioner Suriah ke rezim Assad dan pemerintah Irak. Fokus ini dimulai secara bertahap dari musim panas 2014, khususnya setelah serangan udara Amerika Serikat pada Agustus 2014.[[100]](#footnote-100)

Afiliasi Negara Islam dan simpatisan telah melakukan kurang lebih dari 30 plot dugaan dan serangan teroris terhadap warga Negara dan kepentingan Barat sejak Oktober 2014. Hal ini dibandingkan dengan hanya dua plot dugaan dan satu serangan sebelum tanggal tersebut: plot dugaan London “Mumbai” yang dibersihkan oleh pengadilan Inggris pada Oktober 2013, Riviera Perancis Februari 2014, serangan di Museum Yahudi Brussels Mei 2014. Meskipun serangan terakhir itu dilakukan oleh militan yang dilatih di kamp-kamp Negara Islam, koneksi Negara Islam di sebagian besar serangan/plot telah menyatakan dukungan organisasi dan tidak mendapatkan perintah langsung dari komandan Negara Islam[[101]](#footnote-101)

Hal itu telah berubah. Dalam tiga isu terakhir di Dabiq, fokus Negara Islam adalah pada serangan menghasut di Barat, dibandingkan dengan isu-isu sebelumnya yang berfokus pada legitimisi aturan Negara Islam, de-melegitimasi rival dan musuh (termasuk al-Qaeda dan Taliban) dan menyerukan umat Islam untuk bermigrasi ke wilayah Negara Islam yang telah dikuasai[[102]](#footnote-102)

Misalnya pada 11 Agustus 2015 dan 12 November 2015, isu Dabiq membawa kepala berita masing-masing, “Dari Pertarung al-Ahzab sampai ke Perang Koalisi” dan “Hanya Teror”. Yang pertama membandingkan Amerika Serikat, pemimpin koalisi melawan Negara Islam di tahun 2014-2015 untuk membentuk koalisi suku-suku Arab dan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Terakhir membenarkan serangan teror November 2015 di Paris[[103]](#footnote-103)

Hari ini, kepemimpinan Negara Islam melihat manfaat secara langsung ke Barat dengan memiliki beberapa tujuan yang meliputi menghalangi Barat dalam menyerang wilayah yang sudah dikontrol Negara Islam, membalas lebih dari 20.000 kematian di jajarannya dan penghancuran fasilitas yang dihasilkan dari koalisi serangan udara, memajukan pemindahtanganan Muslim Barat dan karenanya memanfaatkan hal tersebut melalui rekruitmen dan mobilisasi. Kemampuan untuk melancarkan serangan teror di Barat, meskipun di bom berat, memperlihatkan kekuatan Negara Islam yang juga menjalankan tujuan terakhirnya[[104]](#footnote-104)

Hanya saja strategi terror bukanlah hal yang baru. Al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya telah mengerahkan tujuan dan taktik serupa sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil, tetapi juga, dalam beberapa kasus, serangan tersebut menandai awal dari tujuan mereka. Mereka berkisar dari sayap kanan, aktor non-negara neo-fasis seperti Orde Baru Italia di awal tahun 1960an untuk rezim-rezim represif seperti Saddam Hussein dan Muammar al-Qaddafi. Kampanye terror yang terakhir termasuk pemboman klub malam di Berlin (1986) dan ledakan pesawat terbang sipil di Skotlandia (1988). Untuk mencapai kepentingannya dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ISIS pun dikecam dan dianggap berbahaya oleh seluruh dunia. Penalukkan wilayah yang menggunakan cara kekerasan dan upayanya untuk mendirikan negara Islam yang berbasis pada khilafah dengan menyatukan Irak, Suriah, Mesir, Libanon, Yordania, dan Israel yang menjadikan ISIS dianggap sebagai kelompok radikal yang wajib untuk dilawan oleh setiap Negara.[[105]](#footnote-105)

Fenomena ISIS dimana terjadinya pembunuhan, penyiksaan, dan pemaksaan terhadap ideologi dan agama telah membuat ancaman baru dalam politik internasional. Ancaman terhadap keamanan dunia pun hadir seiring dengan eksistensi dan pergerakan ISIS dalam upayanya mencapai kepentingan dalam menciptakan negara Islam. Berbagai strategi militer yang digunakan oleh ISIS, seperti pembunuhan massal, penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, dan pemenggalan tentara dan wartawan, telah menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia dan keamanan negara.[[106]](#footnote-106)

Ini pula mengapa ISIS dapat digolongkan menjadi ancaman terhadap keamanan internasional. Kajian Keamanan menilai ISIS menjadi ancaman keamanan dalam skala internasional karena ISIS tidak hanya melibatkan satu negara saja, melainkan banyak negara dari berbagai dunia. Menekan keberadaan ISIS, baik di dalam politik internasional dan politik domestik, menjadi jalan untuk mengendalikan pengaruh ISIS. Apabila ISIS tidak mampu dikendalikan, stabilitas politik internasional pun akan terganggu dan jaminan keamanan dunia akan menjadi terhambat dan tidak terkendali. Selain itu, jaminan kebebasan manusia akan terhambat dan setiap warga negara memungkinkan hidup dengan ancaman apabila keberadaan ISIS ada di negara mereka dan menjadi liar.[[107]](#footnote-107)

Dalam membicarakan national security, hal yang paling utama adalah kedaulatan sebuah negara di mana ada wilayah, rakyat, dan pemerintah. Apabila national security tidak mampu dicapai oleh sebuah negara, maka human security pun akan terganggu. ISIS sebagai sebuah organisasi yang menjadi sumber ancaman dari luar negara pun memberikan efek yang signifikan terhadap human security dan national security. Seperti yang terjadi di Irak dan Suriah, kegelisahan masyarakat sipil pun terganggu dengan upaya penguasaan wilayah yang dilakukan ISIS dengan jalur kekerasan.[[108]](#footnote-108)

**BAB III**

**PEMBANGUNAN POLITIK KEAMANAN DI INDONESIA**

Keamanan Nasional adalah bagian dari kepentingan nasional yang tak dapat dipisahkan. Bahkan tujuan politik luar negeri untuk mempertahankan kepentingan nasional berkaitan dengan upaya mempertahankan keamanan nasional. Makna keamanan bukan sekedar kondisi aman tentram tetapi keselamatan atas kelangsungan hidup bangsa dan negara. [[109]](#footnote-109)

Keamanan adalah hal utama yang berkaitan dengan nasib sekumpulan manusia, juga berkaitan dengan nasib sekumpulan manusia, juga berkaitan dengan keyakinan bebas dari ancaman. Permasalahan dasarnya, adalah tentang kelangsungan hidup, tetapi hal ini juga mencangkup banyak hal atau urusan tentang sebuah kondisi kelangsungan kehidupan. Keamanan dipengaruhi oleh faktor terdiri dari 5 (lima) sektor utama yaitu ;

1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.

2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.

3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.

 4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.

5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya.[[110]](#footnote-110)

**A. Pembangunan Postur Pretahanan dan Keamanan di Indonesia**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di antara dua samudera dan dua benua memiliki posisi geografis unik dan strategis. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara di kawasan. Indonesia juga memiliki perairan sebagai salah satu urat nadi perdagangan internasional yang menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasandan ancaman keamanan yang berdampak terhadap instabilitas baik di dalam negeri maupun kawasan.[[111]](#footnote-111)

Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia tetap mengedepankan politik bebas aktif yang berpedoman pada prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan, serta berpandangan bahwa negara tetangga merupakan sahabat yang memiliki komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Oleh karena itu, memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam penyelesaian masalah perlu diutamakan serta mendorong perdamaian sesuai prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. Perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleksdan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman digolongkan kedalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikatagorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Dengan demikian, pertahanan negara kedepan memerlukan keterpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi.[[112]](#footnote-112)

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu Indonesia secara aktif mendorong kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan, dan mewujudkan keseimbangan yang dinamis. Pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama.[[113]](#footnote-113)

Pembangunan Postur Pertahanan Negara dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembangunan postur pertahanan militer dan pembangunan postur pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk) melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Pertahanan nirmiliter adalah peran serta Kementerian/ Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dan unsur kekuatan lainnya dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.[[114]](#footnote-114)

Perwujudan pembangunan Postur Pertahanan Negara ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skema anggaran yang realistis guna menjamin kesinambungan rencana pembangunan pertahanan jangka panjang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Di samping itu, pembangunan Postur Pertahanan Negara akan tercapai, jika didukung oleh sumber daya nasional dan meningkatnya perekonomian negara. Pembangunan Postur Pertahanan Negara tetap merujuk kepada Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara yang telah direvisi. Pembangunan Postur Pertahanan Negara harus dapat digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan doktrin dan strategi pertahanan negara, serta diselaraskan dengan adanya sumber daya yang terbatas dan kemungkinan adanya ancaman yang dihadapi[[115]](#footnote-115)

Postur Pertahanan Negara ditetapkan menjadi suatu kebijakan pertahanan negara yang komprehensif dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkannya. Kebijakan tersebut memuat pokok-pokok Pembangunan Postur Pertahanan Negara serta pentahapannya, meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.[[116]](#footnote-116)

Pembangunan Postur Pertahanan Negara didasarkan pada kemampuan negara dalam mengalokasikan anggaran pertahanan dengan tidak mengganggu keseimbangan sektorsektor pembangunan nasional secara menyeluruh. Meskipun demikian dalam membangun Postur Pertahanan Negara harus pula memperhatikan urgensi fungsi pertahanan berdasarkan dinamika kondisi lingkungan dan konteks strategis berdimensi ancaman yang dihadapi.

**B. Konsep keamanan Nasional Indonesia**

 Bersumber pada falsafah hidup atau ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai sebuah ideologi yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila diformulasikan secara lebih konkrit di dalam Pembukaan dan batang tubuhnya UUD RI 1945, sehingga Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Pancasila tidak menolak teori-teori demokrasi yang dipraktekkan oleh negara-negara lain, atau teori-teori yang dianggap universal. Tetapi karena teori-teori tersebut tidak seluruhnya compatible dengan national value baik ideologi, filsafah, sejarah, dan kultur bangsa Indonesia, maka teori-teori tersebut diposisikan sebagai bahan pelengkap atau referensi pembanding. Konsep keamanan nasional Indonesia kemudian menjadi konsep untuk merealisasikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam melindungi keamanan negara dan warga negara[[117]](#footnote-117)

Secara gari besar, keamanan nasional akan mencangkup empat ruang lingkup yaitu keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan negara, dan pertahanan negara. Tiga ruang lingkup pertama sering disebut lingkungan keamanan dalam negeri (*internal security)* dan ruang lingkup terakhir disebut lingkungan keamanan luar negeri (*eksternal security)*.[[118]](#footnote-118)

Dalam usaha keamanan negara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diseluruh wilayah hukum negara termasuk wilayah daratan, perairan serta udara. Setiap orang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban menciptkan rasa aman diseluruh wilayah hukum NKRI. Oleh karena itu merupakan usaha yang menyeluruh dan sepanjang waktu.[[119]](#footnote-119)

Dalam hal ini, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia.

Aktivitas itu adalah fungsi keamanan nasional. Dengan demikian maka selain sebagai kondisi, keamanan nasional adalah juga sebagai fungsi. Sebagai fungsi, pengertiannya adalah memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik (masyarakat) dan perlindungan keamanan warga negara, dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujukan konsep keamanan nasional Indonesia adalah alinea-4 Pembukaan UUD RI 1945. Dalam konteks ini juga berarti bahwa keamanan nasional adalah amanat konstitusi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali wajib untuk melaksanakannya.[[120]](#footnote-120)

Sistem keamanan nasional berisi bagian-bagian, atau subsitem-subsistem, yang terdiri dari subsistem Keamanan Negara, subsistem Keamanan Publik, dan subsitem Keamanan Warga Negara. Subsistem Keamanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi negara sebagai sebuah entitas politik yang meliputi kemerdekaan, kedaukemerdekaan, kedaulatan negara, integritas teritorial, dan tegaknya konstitusi dari setiap ancaman dari manapun datangnya. Ketika menghadapi ancaman yang bersumber utama faktor eksternal, negara menjalankan fungsi pertahanan negara (*defence)*. Sedangkan ketika meng-hadapi ancaman yang sumber utamanya faktor internal, fungsi yang dijalankan adalah keamanan internal (*internal security*). Subsistem Keamanan Publik bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada publik terhadap setiap ancaman atau segala sesuatu yang membahayakan kepentingan dan kebutuhan publik. Subsistem Keamanan Warga Negara bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun berada terhadap setiap ancaman atau segala sesuatu yang dapat membahayakan haknya untuk bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas untuk berkeinginan (*freedom from want*), yang meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.[[121]](#footnote-121)

Sistem keamanan nasional lndonesia adalah upaya terpadu seluruh komponen bangsa, untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari ancaman dan gangguan yang datang dari dalam dan luar negeri, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sistem keamanan nasional juga bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya kondisi keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945.[[122]](#footnote-122)

Selanjutnya berikut adalah fungsi pertahanan dan fungsi keamanan di Indonesia, serta komponen pertahahan dan keamanan

Tabel 4[[123]](#footnote-123)

|  |  |
| --- | --- |
| **Fungsi pertahanan** | **Funngsi Keamanan** |
| Untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.Dalam hal ini pertahanan negara hanya merupakanwewenang pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraannya tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaanya, semua umber daya nasional, termasuk yang berada pada daerah-daerah otonom dapat dipedayagunakan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan negara. | Untuk mewujudkan eksistensi/ kelangsungan hidup manusia dan ketentraman masyarakatDalam hal ini pertahanan negara hanya merupakanwewenang pemerintah pusat, namun penyelenggaraannyapun harus mempertimbangkan perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintah negara yang bersifat desentralistik kecuali wewenang di bidang yustisi dan penegakan hukum. |

Table 5[[124]](#footnote-124)

|  |  |
| --- | --- |
| **Komponen pertahanan** | **Komponen keamanan** |
| Komponen Utama* TNI AD, TNI AL, TNI AU

Komponen Cadangan* Cadangan TNI AD, TNI AL,TNI AU

Komponen Penunjang* Sumber daya alam
* Sumber daya buatan
* Sarana dan prasarana
* Segenap warga negara
 | Kepolisian NegaraKepolisian Khusus(Imigrasi, Kehutanan, dll)Penyidik pegawai Negeri Sipil |

 Tujuan Negara dalam bidang keamanan ialah rasa aman yang dimiliki oleh setiap orang dan semua kalangan, dan mencangkup empat unsur yaitu, bebas dari gangguan dan ancaman (*security),* rasa terjaminnya keselamatan dirinya (*safety),*  terjaminnya kepatian tentang benar dan salah menurut hukum (*surety)* dan rasa damai bebas dari kekhawatiran(*peace). [[125]](#footnote-125)*

**C. Profesionalisme Aparat dan Reformasi Pembangunan Sistem Pertahanan dan Keamanan di Indonesia**

**1. Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.[[126]](#footnote-126) Organisasi ketentaraan Negara kita adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perubahan- perubahan yang berlangsung setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai Presiden telah mempercepat tumbuhnya suatu kesadaran baru tentang makna reformasi. Meskipun sulit dielakan kenyataannya akan berbagai makna dan penekanan reformasi dimulai dari sekedar nam, jargon dan kemudian perubahan pejabat pemerintahan sampai corak perubahan yang fundamental, yang pasti bahwa ABRI telah memelopori melakuka reformasi internal dengan berbagi kebijakan seperti redifinisi, reaktualisasi dan reposisi peran TNI sampai dengan pemisahan POLRI dan ABRI menjadi TNI.[[127]](#footnote-127)

Tahun 1975 lahir doktrin Kekaryaan ABRI sebagai doktrin pelaksanaan kegiatan-kegiatan kekaryaan ABRI. Dalam doktrin ini dinyatakan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.[[128]](#footnote-128)

Masalah dwifungsi pada dasarnya terbentuk dari pandangan yang melihat TNI bukan sekedar Institusi atau kelompok yang berbeda dengan institusi atau masyarakat sipil melainkan terpisah sebagai suatu sitem tersendiri dengan fungsi-fungsi yang spesifik serta berhadapan dengan sistem dan bahkan entitas lain dalam keseluruhan masyarakat bangsa.[[129]](#footnote-129)

Karenanya reformasi seharusnya mampu mengembalikan TNI kepada peran yang sesungguhnya dalam masyarakat bangsa dan negara. Ataupun dengan kata lain terjadi transformasi dari fungsi kepada peran dalam masyarakat bangsa. TNI masih merupakan subsistem dari keseluruhan sistem sosial masyarakat bangsa dan negara Indonesia.[[130]](#footnote-130)

 Beberapa langkah awal reformasi organisasi TNI adalah mengubah nama ABRI menjadi TNI, kemudian diikuti dengan langkah restrukrisasi dan reorganisasi TNI. Misalnya, likuidasi beberapa organisasi ABRI yang dianggap tak sesuai dengana semangat reformasi seperti Badan Pembinaan Kekaryaan (Babinkar) yang di era orde baru mengelola penempatan ABRI dalam struktur pemerintahan sipil, likuidasi Kepala Staf Komando Teritorial (Kaster) TNI, serta likuidasi Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstanas) yang membuat militer mengontrol kehidupan politik.[[131]](#footnote-131)

 Demokratisasi politik tingkat nasional kemudian melahirkan produk regulasi politik dan kebijakan yang menata sistem keamanan nasional ini. Tercermin dalam langkah berupa pemisahan TNI dan POLRI melalui TAP MPR No. VI tahun 2000 dan TAP MPR No. VII Tahun 200 yang mengatur tentang pemisahan TNI dan POLRI, dimana TNI disebutkan sebagai alat pertahanan Negara dan POLRI disebutkan sebagai alat keamanan Negara.[[132]](#footnote-132)

 Proses reformasi yang secara tegas dan formal telah memisahkan kedua institusi tersebut. Sebagai institusi militer dan institusi sipil. TNI adalah institusi militer dan polisi sebagai institusi sipil. TNI adalah institusi militer dan fungsi pertahanan (eksternal). [[133]](#footnote-133)

 Selanjutnya reformasi politik yang spesifik mengatur organisasi TNI ditetapkan melalui Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Implikasi kebijakan perundang-undangan ini membawa dampak positif bagi pergeseran doktirn pertahanan yang semula bertumpu pada TNI Angkatan Darat (AD), mulai bergeser perlahan pada doktrin kekuatan gabungan. Doktirn ini membawa TNI AL dan AU menjadi komponen penting dalam rangka menjaga pertahanan Indonesia.[[134]](#footnote-134)

 Adapun dalam menjalankan perannya TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki kode etik, yang merupakan kode kehormatan prajurit yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan prajurit. Kode etik TNI dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi TNI sebagai berikut:

* Penangkal, penangkal terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaultan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
* Penindak, penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, yaitu kekuatan TNI mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaultan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
* Pemulih, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan kemanan. Kekuatan TNI bersama-saa instansi pemerintah lainnya membantu fungi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamnan yang terganggu akibat kekacauan karena perang, pemberontkan, konflik kumunal, huru hara, dan terorisme.[[135]](#footnote-135)

 Terkait peran dan fungsi TNI pada masa reformasi, kita bisa mencatat bahwa kebijkan dibidang pertahanandan keamanan saat ini lebih dititik beratkan pada penataan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang ditetapkan TAP MPR, UU Kepolisian Negara, Pertahanan Negara, dan UU TNI serta amademen pasal 30 UUD 1945 yang menetapkan tentang Sishankamrata. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dibidang pertahanan dan keamanan sebagai berikut *pertama;* Penataan kembali TNI sesuai paradigm baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi,dan reaktualisasi pera;. *Kedua;* TNI sebagai alat negara.Pembangunan kemampuan sistem pertahanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama yang didukung oleh komponen lain dan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, POLRI dan Rakyat.[[136]](#footnote-136)

 Berdasarkan hal di atas, maka pertahanan negara merupakan semua usaha/upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, hal tersebut sejalan dengan tugas pokok pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam doktrin TNI Tri Dharma Eka Dharma (Tridek) memiliki hakikat, dasar, tujuan dan fungsi:

* TNI berperan sebagai unsur dalam kegiatan manusiaan
* TNI berperan sebagai unsur bantuan kepada POLRI dalam rangka keamanan, seperti terorisme dan separatis.[[137]](#footnote-137)

 Dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang menyangkut masalah keamanan nasional, khususnya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI antara lain diperlukan profesionalisme TNI. Tetapi upaya peningkatan profesionaisme aparat pertahanan dan keamanan tidaklah mudah mengingat banyak sekali kendala yang dihadapi. Misalnya anggaran, peralatan utama sistem persenjataan, sumberdaya manusia doktrin strategis, serta ketergantungan teknologi pada pihak asing.[[138]](#footnote-138)

**a). Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta**

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan serta mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.[[139]](#footnote-139)

Pertahanan sendiri berasal dari kata tahan Kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan mempunyai arti keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal. Dengan pengertian tersebut, pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.[[140]](#footnote-140)

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai kekuatan pertahanan.[[141]](#footnote-141)

Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal dengan Sishankamrata. Sifat kesemestaannya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

 Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Kementerian Pertahanan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.[[142]](#footnote-142)

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang efektif adalah pertahanan dan keamanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara lain baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.[[143]](#footnote-143)

**2. Reformasi Polisi Republik Indonesia (POLRI )**

Pada tanggal 1 Juni 1968, Presiden Soeharto membuat pernytaan politik agar polisi kembali pada fungsinya sebagai kepolisian. Oleh sebab itu, sejak 27 Juni 1969 nama Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) yang sejenis dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan masih mencerminkan sifat kemiliteran diubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Sedangkan nama jabatan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Kapolri. Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.juga berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia[[144]](#footnote-144)

Sedangkan pada masa reformasi, kekuatan POLRI menganut *integrated system* sebagai Kepolisian Negara. Kebijakan yang akan dijalankan dalam pembinaan kekuatan ialah meningkatkan sistem keamanan bersama.

Kekuatan POLRI menganut *integrated system* sebagai Kepolisian Negara. Kebijakan yang akan dijalankan dalam pembinaan kekuatan ialah meningkatkan sistem keamanan bersama. Isilah lain POLRI menyangkut keamanan adalah “keamanan dan ketertiban masyarakat”. Istilah ini menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.[[145]](#footnote-145)

Fungsi POLRI dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah wujud pelaksanaan tugas-tugas POLRI yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadaan yang tertib dan aman.[[146]](#footnote-146) Sebagai alat penegak hukum, POLRI memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum biasanya diawali oleh POLRI sebagai salahsatubagian unsur dari hukum. Sebagai alat negara yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, POLRI dituntut untuk memberikan perlindungan, keamanan,dan pelayanan masyarakat.[[147]](#footnote-147)

Dalam menjelaskan mengenai peran dan fungsi POLRI dalam keamanan negara ini, pertama kita kita paparkan bahwa secara universal fungsi kepolisian merupakan bagian integral dan fungsi pemerintahan negara yang berbeda dengan fungsi militer. Organisasi kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk untuk mengemban fungsi kepolisian yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang (warga negara ataupun orang asing) dari keadaan bahaya atau gangguan serta tindakan-tindakan melanggar huukum.[[148]](#footnote-148)Peran dan Fungsi Kepolisian dalam keamanan negara,

 **POLRI sebagai alat keamanan negara,** dalam menjalankan peran nya POLRI bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara; **POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,** dalam hal ini POLRI memegang wewenang dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudnya kamtibnas yang kondusif;  **fungsi POLRI untuk menegakan hukum,** dalam hal ini POLRI sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang langsung berhubungan dengan masyarakat.[[149]](#footnote-149)

 Berdasrkan konsep keamanan POLRI tersebut maka setiap persoalan keamanan dipilih sesuai dengan skala dan derajat ancamanya, tidak di generalisir sehingga menimbulakan kerancuan di masyarakt karena semua persoalan ditinjau dari satu pendekatan saja. Oleh karenanya POLRI memililah dan membedakan masalah keamanan, pertahanan serta stabilitas.[[150]](#footnote-150)

**D. Potensi Ancaman Pertahanan Keamanan di Indonesia**

**1. Keberadaan Kelompok Islam Garis Keras di Indonesia**

 Kekuatan Islam radikal berkembang dengan baik dalam perpolitikan Indonesia sejak orde baru. Pemicu eskalasi kekuatan radikal karena kondisi politik bangsa yang terbuka dan transisional yang membawa sistem politik Indonesia semakin liberal. Perubahan tersebut mengubah berbagai peta politik dan ideology dalam masyarakat, bermacam-macam ideologi muncul dan menyatakan diri secara terbuka, bersaing dengan berbagai ideologi lainnya serta sesame kekuatan Islam sendiri.[[151]](#footnote-151)

 Potret kekuatan radikal tersebut berfokus pada pergerakan yang lahir bersamaan dengan meluasnya akses dan kesempatan sejumlah organisasi untuk melakukan ekspansi ke berbagai basis umat. Organisasi gerakan lain yang menunjukan watak radikal dan militant adalah kelompok teroris yang memperjuangkan Islam melalui cara-cara kekerasan dan tindakan anarkis. Terorisme sering didefinisikan sebagai ancaman penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan atau agar terjadi perubahan politik.[[152]](#footnote-152)

 Sejak Bom Atrium Senen tahun 2000 Bom Bali I tahun 2002, Bom Kedutaan Besar Australia, Bom Bali II dan serangkaian pengeboman lainnya yang dilakukan oleh kekuatan teroris local maupun macanegara dengan tujuan utama yakni terjadinya perubahan politik. Terorisme global sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus teror dengan jelas ditunjukan untuk mengubah pola kebijakan politik global terhadap dunia Islam. Tragedi 9/11 memfokuskan dunia terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok radikal beratasnamakan Islam. Amerika memngutuk keras kejadian tersebut dan mengatakan kelompok Islam radikal merupakan dalang dari kasus ini. Tuduhan tersebut ikut menentukan pola pengelompokan organisasi radikal Islam di Indonesia. [[153]](#footnote-153)

Ada konteks global yang memberi ruang bagi berkembangnya kekuatan-kekuatan radikal di Indonesia yakni ketidakadilan global yeng dipertunjukan Amerika terhadap umat Islam. Tokoh utama yang selalu menjadi pusat perhatian dalam soal ini adalah Dr. Azhari dan Noordin M top, dan Abu Bakar Baas’yir dan nama-nama lainnya yang sering dipublikasikan media sebagai otak tindakan kekerasan di Indonesia.[[154]](#footnote-154)

Secara umum, kekuatan radikal Islam Indonesia tercermin dari meluasnya berbagai organisasi gerakan-gerakan yang ditandai dengan ciri-ciri umum yakni dengan mengajak kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah serat melakukan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan secara literal dan Salafi sebagai ideology kekuatan radikal. [[155]](#footnote-155)

Ideologi Salafi dan Jihad sebagai simbol untuk melakukan perlawanan terhadap modernisasi dan sistematis mengampanyekan suatu sistem sosial islami. Kelompok Salafi percaya bahwa langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengislamkan umat islam melalui pendidikan, purifikasi atau pemurnian ajaran sebelum sampai pada proses penerapan syariat Islam.[[156]](#footnote-156)

Ideologi Salafi menekankan praktik keagamaan sesuai yang disunahkan oleh Rasullalah dan para sahabatnya. Pemahaman semacam ini berkitan erat dengan geraan Wahabi, pengikut Wahabi digambarkan sebagai pihak yang paling kejam, ektrem dan fanatik yang mengambil tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang berbeda dengan mereka. Semula ideologi Salafi yang merupakan manifestasi dari Wahabi hanya berorientasi pada pemurnian agama dari berbagai pengaruh luar Islam, kemudian bergeseer pada penguatan kesadaran ideologis dan politik untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil. Selain itu, penekanan konsep jihad an kewajiban kaum Muslim untuk membela Islam dari musuh-musuhnya menjadi penting dalam menumbuhkan semangat anggotanya. pemahaman ideologi inilah yang menumbuh subukan kekuatan-kekuatan radikal atau militant Islam di Indonesia.[[157]](#footnote-157)

Gerakan tersebut mendefinisikan teks-teks Islam berdasarkan apa yang ada dalam teks itu secara literal, dan menganggap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak berdasarkan ajaran Islam. Hal ini memiliki kecenderungan mengambil tindakan dan langkah-langkah radikal untuk mencapai tujuan tersebut.[[158]](#footnote-158)

Dari ciri-ciri semacam itu terdapat beberapa organisasi gerakan Islam radikal yang berkembang di Indonesia seperti Laskar Jihad, Laskar Pembela Islam dan Laskar Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam (FPI).[[159]](#footnote-159)

Kemunculan kelompok radikal dan intoleransi merupakan masalah serius. Perilaku mereka kerap diikuti ujar kebencian. Hal ini dapat memicu munculnya konflik sosial satu dan lainnya. Eksistensi kelompok radikal dan intoleransi umumnya ditandai dengan adanya gagasan dan pemikiran intoleeransi dengan cara menghasut, menyulut, ujaran kebencian.[[160]](#footnote-160)

Hal ini lah yang mendorong kekuatan Islam Radikal di Indonesia semakin tinggi, dengan ujaran kebencian dan hasutan ini dapat menimbulkan konflik atau perpecahan bangsa diistegrasi bangsa. Sifat intoleran dapat memicu konflik bekepanjangan. Fakta menunjukan dominasi permasalahan Indonesia saat ini adalah ketika kelompok radikal dan intoleran melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan dan ketentraman masyarakat bangsa dan negara.[[161]](#footnote-161)

**2. Persepsi Ancaman ISIS Bagi Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia**

Indonesia merupakan destinasi penyebaran ideologi jihad ISIS yang prospektif. Hal tersebut disebabkan ada beberapa faktor. Pertama, jumlah mayoritas masyarakat muslim yang sangat besar. Kedua, banyak munculnya gerakan-gerakan radikal yang membawa simbol jihadisme dan pendirian *Khilafah Islamiyah*. Ketiga, banyaknya warga negara Indonesia yang ikut terlibat dalam gerakan jihad internasional sehingga terpengaruh dengan gerakan ISIS. Kelompok jihad ini tentu akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam usahanya melakukan indoktrinasi terhadap masyarakat yang lain.[[162]](#footnote-162)

Dilihat dari tujuan terbentuknya ISIS, bisa dikatakan bahwa organisasi ini tidak bisa dikatakan sebagai masalah agama. Kelompok ini lebih tepat dikatakan sebagai ideologisasi pembentukan negara Islam, atau disebut dengan masalah perbedaan ideologi. Ditinjau dari perspektif ini, maka kemunculan ISIS di Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar bagi pertahanan keamanan nasional. Ideologisasi pendirian negara Islam menjadi rongrongan bagi ideologi Pancasila yang telah menjadi falsafah kebangsaan dan fondasi terbentuknya NKRI. Indoktrinasi khilafah Islamiyah bisa berakibat terhadap tindakan makar terhadap negara sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. Sejarah Indonesia mengenal adanya pendirian negara Islam Indonesia (NII) yang didalangi oleh SM. Kartosuwiryo. ISIS bisa dipahami sebagai bibit munculnya makar terhadap negara seperti yang telah dilakukan oleh Kartosuwiryo melalui NII pada masa lalu.[[163]](#footnote-163)

Pemerintah indonesia, secara tegas telah menyatakan pelarangan terhadap ISIS. Hal ini merupakan langkah tepat untuk menjaga keutuhan NKRI. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ISIS mempunyai potensi untuk mengancam pemerintahan dan keamanan nasional. Potensi tersebut muncul dari usaha kelompok ini untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada terbentuknya khilafah Islamiyah. Hal ini tentu bertentangan dengan UUD 1945.[[164]](#footnote-164)

Kemunculan ISIS di Indonesia merupakan sebuah tantangan nyata dan juga sekaligus sebagai peluang bagi pemerintahan. Tantangan yang dimaksudkan adalah untuk mengikis habis dan memutus rantai ideologisasi ISIS agar tidak mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Sekaligus sebagai peluang untuk menarik pelarangan terhadap ISIS dalam spektrum yang lebih luas, yaitu pelarangan terhadap semua kelompok yang menekankan ideologisasi pendirian *Khilafah Islamiyah*. Apapun dan bagaimanapun bentuk kelompoknya harus dilarang sebagai tindakan preventif menyebarnya ideologi pembentukan negara Islam.[[165]](#footnote-165)

Tujuan ISIS adalah untuk mendirikan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah. Akan tetapi, upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan berbagai tindakan radikal dan kejahatan kemanusiaan. Propaganda dengan memanfaatkan berbagai fitur teknologi informasi menjadikan ideologi ISIS tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, yang selanjutnya menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia.[[166]](#footnote-166)

Dalam konteks Indonesia, pemerintah segera merespon dengan melarang eksistensi ISIS karena dinilai bertentangan dengan ajaran ideologi Pancasila, ajaran Islam mainstream, dan kebhinnekaan di Indonesia. Ancaman kelompok radikan ISIS di Tanah Air ini bisa berbagai bentuk, mulai dari propaganda atau penyebaran ideologi, hingga ancaman secara terbuka dan terang-terangan kepada aparat dan Pemerintah RI.Sebut saja ledakan arus balik para TKI atau mahasiswa yang belajar di Timur Tengah, mereka sangat rentan bergabung ISIS. Ada ratusan WNI yang diduga pernah bergabung dan dilatih ISIS, yang sebagian mereka sudah kembali ke Tanah Air. Ini menjadi ancaman besar di Tanah Air.[[167]](#footnote-167)

Selaku Badan Pemerintahan Indonesia dalam penanggulangan aksi terror yaitu BNPT Badan Nasioonal Penanggulangan Terorisme, mewaspadai jaringan terorisme dari luar negeri berkembang di Indonesia. Terlebih jaringan terorisme ISIS yang kini tengah merekrut anggota dari seluruh negara termasuk Indonesia.[[168]](#footnote-168)

Selain itu Indonesia dijadikan lokasi Provinsi Negara Islam dengan istilah *Wilayat Indonesia.* Dengan hal ini pemerintah Indonesia menyimpulkan bahwa ancaman Negara Islam merupakan bentuk ancaman nyata untuk wilayah NKRI.[[169]](#footnote-169) Kelompok radikal yang pernah berlatih di Timur Tengah juga menjadi ancaman, BNPT mengendus adanya keterkaitan antara jaringan Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) dengan kelompok radikal ISIS. Ia mencurigai ada sejumlah aliran dana yang masuk dari ISIS ke kelompok teroris pimpinan Santoso itu.[[170]](#footnote-170)

Selain itu ancaman nyata yang mengancam keamanan insani (*human security)* yaitu aksi teror di ibu kota Jakarta yang menewaskan dua orang, dan korban luka-luka yang terjadi pada tahun 2016.ISIS mengklaim kejadian itu merupakan akssi teror yang dilakukan oleh ISIS. Melihat potensi ancaman ISIS, Pemerintah lebih menyadari ancaman dari gerakan radikal di Indonesia terlebih dari gerakan ISIS dan meminta warga negara Indonesia untuk lebih berhati-hati dengan gerakan-gerakan radikal yang mungkin dapat mengancam kapan saja. [[171]](#footnote-171)

Maka selain Pemerintah dan aparatur negara lainnya, keterlibatan komunitas masyarakat terutama lingkungan lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat serta generasi muda itu sendiri dalam mencegah terorisme menjadi sangat penting. Karena itulah dibutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam memerangi terorisme demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara tercinta yang damai, adil dan sejahtera.[[172]](#footnote-172)

**BAB IV**

**Kebijakan Deradikalisasi Pemerintah terhadap Ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia**

1. **Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia**

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) dalam bahasa Indonesia mereka disebut Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS), merupakan sebuah organisasi yang berasaskan Islam. Sekarang berubah menjadi Islamic State (IS) atau Negara Islam.[[173]](#footnote-173)

Dikabarkan ISIS sekarang ini beranggotakan kurang lebih sekitar 1.500 milisi lintas-negara dan seorang komandan perang yang memiliki gaya kepemimpinan khas al-Qaeda, telah berkembang menjadi ancaman di seluruh dunia.[[174]](#footnote-174)

Fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau NIIS (Negara Islam Iraq dan Suriah)—selanjutnya disebut NIIS—di Timur Tengah yang resonansinya begitu kuat dirasakan di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara berpenduduk Muslim seperti Indonesia. Berbagai ulasan dan respons intelektual telah diberikan di sejumlah media. Namun demikian, fokus utama perjuangan Negara Islam lebih berfokus pada ideologi gambaran kekuatannya, ekspansinya, dan getaran pengaruhnya di negeri ini.[[175]](#footnote-175)

Akibat serangan kilat NIIS, korban jiwa di kalangan masyarakat sipil ditengarai telah melampaui angka 2400 orang. Mereka juga telah menyebabkan sejumlah 30 ribu warga di Timur Suriah mengungsi. Gerakan radikal ini mendapatkan dukungan dari para “mujâhid” yang berasal dari berbagai negara di dunia, baik negara sekuler di Barat maupun negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Seperti diketahui, disinyalir terdapat 56 orang WNI yang mengikuti gerakan ini. Ajakan terbuka dari salah seorang WNI dengan berbahasa Indonesia yang ditujukan bagi umat Islam di negeri ini dapat disaksikan bersama melalui media YouTube. Gerakannya menyerupai organisme modern yang didukung oleh infrastruktur kenegaraan yang memadai. Maka, jadilah NIIS seperti sekarang ini, dengan mudahnya melakukan ekspansi dan penguasaan militer atas beberapa wilayah penting di kawasan dimaksud. Satu demi satu, kota-kota penting di Irak pun jatuh ke tangan NIIS, seperti Fallujah, Tikrit dan Mosul, kota terbesar kedua setelah Baghdad.[[176]](#footnote-176)

Aksi Negara Islam sama seperti teroris yang tujuannya menegakkan syariat Islam, adanya bom bunuh diri, menakut-nakuti, meneror masyarakat Indonesia. Dengan adanya kemunculan video yang terkait dengan propaganda ISIS yang dimana dalam video tersebut adanya seorang pria asal Indonesia bernama Abu Muhammad al-Indonesi yang mengajak agar rakyat Indonesia mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia. Propaganda melalui media sosial dilakukan dengan menggunakan dalil-dalil jihad dan khilafah sehingga beberapa warga Indonesia terpengaruh dan bergabung dengan kelompok tersebut.[[177]](#footnote-177)

Pergerakan ISIS di Indonesia menimbulkan dampak bagi negara dan warga negaranya, dampak yang timbul ialah warga Indonesia yang terpengaruh pada ideologi ISIS ini pergi ke Suriah untuk bergabung dengan anggota ISIS yang ada disana. Dampak lainnya ialah tidak stabilnya pemikiran umat Islam Indonesia yang mudah terpengaruh paham-paham radikal, sehingga dampak sosial yang ada ialah banyaknya pemuda-pemuda yang bergabung dengan ISIS karena target utama ISIS untuk merekrut kaum muda.[[178]](#footnote-178)

Melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim membuat Indonesia dijadikan salah satu lokasi perekrutan jihadis-jihadis yang siap berjuang di Irak dan Suriah atau menyebarkan pengaruh ideologi pandangan radikal di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menolak paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaung dalam NKRI.Pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat mengaris bawahi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam.[[179]](#footnote-179)

Ada tiga hal yang mendasari larangan tersebut. Alasan pertama adalah sumber dana besar yang diraih ISIS kabarnya banyak didapat dari hasil tindak kriminal. Alasan kedua adalah adanya indoktrinisasi konsep baiat (kekerasan) dalam aksi yang dilakukan oleh ISIS, di mana jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun hal ketiga adalah karena ISIS ingin membentuk sistem kekhalifahan atau negara Islam, di mana jelas bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi harga mati negeri ini.[[180]](#footnote-180)

Maka dari itu sebagai Negara Kesatuan Indonesia perlu menjaga stabilitas politik kemanan demi tercapai nya rasa aman bebas dari ancaman yang dapat menggangu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat baik sipil, militer dan pemerintah bekerja sama dalam mencegah paham radikal dan sifat intoleran yang dapat menjadi ancaman diistegrai bangsa.[[181]](#footnote-181)

1. **Ideologisasi Intrument Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia**

Dalam upaya perekrutan jihadis, Negara Islam menyebarkan ideologi radikal untuk menarik para pejuang muslim bergabung. Ideologi utama gerakan NIIS adalah takfîr (mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya) dan membunuh siapa saja yang menentang ideologi keagamaannya. Ideologi takfîr ini mengingatkan kita pada sebuah gerakan Islam radikal di Mesir yang bernama al-Takfîr wa al-Hijrah yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981.13 Dengan ideologinya yang ultrapuritan, Negara Islam telah menghancurkan banyak masjid di wilayah yang mereka duduki. Mereka berkeyakinan bahwa masjid-masjid tersebut telah menjadi tempat pemujaan yang dianggap musyrik atau bertentangan dengan aqidah tauhid. Bahkan mereka berniat melakukan ekspansi ke seluruh dunia Islam dan menghancurkan bangunan Ka„bah di Mekkah karena menurut mereka telah berfungsi sebagai pusat pemujaan kemusyrikan.[[182]](#footnote-182)

Mobilisasi kaum jihadis dari Suriah ke Iraq terjadi karena panjangnya perbatasan kedua negara di timur laut dan sangat longgar. Pergerakan para pejuang NIIS ke Iraq tidak terawasi dengan baik oleh otoritas masing-masing negara. Adapun mobilisasi para jihadis Indonesia dapat dilakukan melewati Turki yang juga berkepentingan agar rezim Bashar al-Assad jatuh. Di perbatasan Turki-Suriah terdapat sejumlah pihak yang membantu para jihadis memasuki Suriah. Otoritas Turki jelas menutup mata terhadap pergerakan massal kaum jihadis yang melewati perbatasannya untuk memasuki Suriah. Setelah memasuki Suriah, mereka menyebar ke berbagai distrik di wilayah Idlib sebagai basis perlawanan anti rezim Bashar al-Assad.[[183]](#footnote-183)

Negara Islam termasuk ke dalam organisasi jihad-salafisme. Salafisme dan menyebarkan ideologi jihad sebagai alat pergerakan utama demi menuju ke khalifahan diseluruh dunia. Jihadi-Salafisme merupakan kombinasi antara dua paham, yakni aksi Jihad dan pengembalian paham-paham kitab suci yang literal. Secara sederhana, Kepel mengartikan paham JihadiSalafisme pada masa 1990-an adalah sebuah ide doktrin politik yang bertujuan untuk mengembalikan pemahaman Islam literal yang fundamental di era modern melalui aksi perlawan, khususnya melawan AS dan negara Barat.[[184]](#footnote-184)

Kepel menambahkan Jihad-Salafisme menggambarkan sebuah doktrin gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan masa kejayaan Kekhalifaan di era modern melalui slogan “Jihad”. Secara etimologi, kata “Salaf” berarti “yang lampau”, di mana terminologi Salafisme diartikan sebagai sebuah istilah yang merujuk kepada pengembalian masa lampau terkait zaman keemasan Islam di era Kekhalifaan, yakni tiga generasi pertama: (para sahabat, tâbi‘în, dan tâbi‘ al-tâbi‘în). Kemudian, pemahaman terhadap Salafisme di era modern saat ini mengalami pergerseraan makna oleh beberapa kalangan. Media dan buku-buku akademis mengartikan paham Salafi sebagai gerakan yang merujuk kepada Islam intoleran, rigid bahkan reaksioner[[185]](#footnote-185)

Dengan ideologi tersebut, Negara Islam memberikan pengaruh terhadap perpolitikan dunia, dan menjadikan Negara Islam begitu dikenal oleh masyarakat dunia, bahwa melakukan aksi radikal di sah kan demi tercapai nya ke kahlifahan. Berlarut-larutnya penanganan kekerasan di Iraq dan Suriah dapat menciptakan medan jihad baru sebagaimana pernah terjadi di Afghanistan. Para alumni perang Afghanistan kemudian membentuk ikatan-ikatan milisi baru di Indonesia sepulangnya dari berjihad di negara tersebut dan mereka menjadikan Indonesia sebagai medan perjuangan berikutnya untuk melancarkan perang melawan ke kafiran.

Bila konflik di Iraq-Suriah ini dapat diakhiri, kepulangan para alumni ke negara masing-masing, terutama ke Indonesia, harus diwaspadai karena dapat membawa amunisi bagi tumbuhnya ideologi dan gerakan jihad baru di negeri ini. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh para veteran perang Afghanistan yang melakukan serangkaian operasi pengeboman terhadap pusat-pusat yang diidentifikasi sebagai musuh Islam, seperti bom Bali I pada tahun 2002. Kondisi semacam ini dikhawatirkan dapat melahirkan gelombang jihadis baru ke berbagai penjuru dunia dan menciptakan instabilitas keamanan di negara masing-masing, sebuah kondisi yang sudah barang tentu sangat perlu untuk diwaspadai.[[186]](#footnote-186)

Pemerintah Indonesia menyatakan, Negara Islam bukanlah masalah agama melainkan ideologi atau keyakinan yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, hal ini lah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indonesia. Sejak awal banyak kalangan yang mengkhawatirkan penyebaran ideologi radikal kelompok ISIS akan membahayakan keberagama masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan keras menyatakan, menolak ideologi yang diusung kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah, alias ISIS dan melarang pengembangan ideologinya di Indonesia.[[187]](#footnote-187)

1. **Dukungan Gerakan Politik Kelompok Garis Keras Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia**

Fakta sebagaimana tergambar di atas mengindikasikan bahwa salah satu kantong simpatisan dan pendukung gerakan NIIS di Indonesia adalah kelompok Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba‟asyir.[[188]](#footnote-188)

Salah seorang provokator yang muncul di media YouTube berisi ajakan bagi sesama Muslim Indonesia bergabung dengan para pejuang NIIS adalah Abu Muhammad al-Indonesiy alias ahrumsyah. Keterlibatan Bahrumsyah bersama Forum Aktivis Syari’at Islam (Faksi) mempercepat pendeklarasian dukungan NIIS di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Ciputat, Banjarmasin, Bekasi, Solo, Sidoarjo, Malang, Bima, Lombok, dan Poso. Disinyalir dari bantuan Bahrumsyah pula, ditemukan fakta bahwa 56 orang Indonesia kini telah bergabung dengan NIIS di Iraq dan Suriah, sebagian kecil di antaranya telah terbunuh di medan perang akibat serangan pasukan AS dan sekutunya maupun bom bunuh diri.[[189]](#footnote-189)

Secara sosiologis, target group untuk rekrutmen mereka adalah kelompok remaja yang secara psikologis masih berada pada masa transisi. Kelompok selanjutnya adalah kalangan awam yang sejak kecil tidak mengenyam pendidikan agama mendalam di pesantren. Ketika mereka bertemu dengan kaum jihadis, mereka merasa terlahir kembali menjadi Muslim (reborn Muslim). Dengan sisa-sisa usianya, mereka ingin bertobat (hijrah) dari masa lalu mereka yang kelam dengan cara berjihad (qitâl) di jalan Allah. Kelompok inilah yang berusaha memperluas pengaruhnya di Indonesia melalui pengajian-pengajian rahasia. Sebagian dari mereka berhasil digulung atau dilumpuhkan oleh aparat keamanan, tetapi sebagian lagi masih menjadi TO (Target Operation) yang hingga kini belum tertangkap. Dari kelompok yang belum tertangkap inilah, sebagian melarikan diri ke pusat-pusat konflik di Timur Tengah dan bergabung dengan milisi NIIS.

Bukti-bukti adanya dukungan sejumlah masyarakat Muslim Indonesia terhadap NIIS juga dapat dilihat dari maraknya pemasangan gambar, mural, poster, dan bendera NIIS di sejumlah tempat, terutama di sekitar Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai basis gerakan radikalisme dan jihadisme paling aktif di negeri ini. Kemunculan simbol-simbol NIIS di sekitar Solo sebenarnya sudah muncul beberapa saat sebelum hebohnya tayangan propaganda NIIS di media massa. Misalnya, laman Pembela Tauhid dan Risalah Tauhid yang diyakini berafiliasi ke JAT aktif mengunggah informasi dan foto tentang kekerasan yang dilakukan oleh kaum jihadis di Timar Tengah, metode kekerasan, ightilayat cara membunuh secara diam-diam), propaganda NIIS, dan berbagai berita tentang penindasan dan penderitaan yang dialami oleh sesama Muslim di seluruh dunia.[[190]](#footnote-190)

Diketahui bahwa dukungan terhadap NIIS pertama kali disuarakan oleh FAKSI (Forum Aktivis Syariat Islam), di mana Bahrumsyah bergabung, pada sebuah acara pengajian di masjid Fathullah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 8 Februari 2014. Tema yang diambil pada pengajian tersebut adalah Support and Solidarity for NIIS. Setelah itu, sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Ans âr al-Khilâfah Jawa Timur mendeklarasikan dukungan mereka kepada NIIS pada tanggal 20 Juni 2014. Satu bulan setelah itu, dukungan yang sama juga muncul di Surakarta. Pada 4 Agustus 2014, kelompok pendukung NIIS sepakat mengganti nama NIIS menjadi SILIR, kependekan dari Suriah Indonesia Lan Iraq, supaya lebih mudah diingat. Empat hari kemudian, 8 Agustus 2014, sejumlah atribut NIIS juga bermunculan di Jambi.[[191]](#footnote-191)

Sementara itu, di sebuah masjid bernama masjid al-Muhajirin di Bekasi, dukungan terhadap NIIS juga dideklarasikan oleh sebanyak 50 orang jemaah pada 3 Agustus 2014. Selain sejumlah peristiwa di atas, terdapat pula indikasi dukungan terhadap NIIS di Malang dan Sidoarjo. Di Malang, dukungan terhadap NIIS diberikan oleh sebuah organisasi bernama Anshorul Khilafah. Pembaiatan dan pernyataan dukungan dilakukan di sebuah masjid di Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juli 2014. Sekalipun acara pendeklarasian dukungan terhadap NIIS ditampik oleh otoritas pemerintahan, pengakuan datang dari salah seorang “penyusup” yang menyamar sebagai bagian dari jemaah pendukung NII

Gerakan jihadis di Indonesia mengalami fase metamorfosis yang panjang. Pada awalnya adalah Jamaah Islamiyah (JI) yang didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba‟asyir (ABB) di Solo[[192]](#footnote-192)

Sekalipun keberadaannya banyak ditolak oleh sesama kelompok radikal dan jihadis, bukan berarti NIIS tidak memiliki simpati dan dukungan sama sekali di negeri ini. Kehadiran 56 WNI yang sudah terlanjur bergabung dengan NIIS menjadi bukti sahih bahwa gerakan jihadis ini juga menancapkan pengaruhnya atas sejumlah Muslim di Indonesia. Pengaruh NIIS dapat diidentifikasi pada ormas jihadis seperti JAT dan jaringan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Pengaruh NIIS juga dapat ditemukan pada sejumlah individu jihadis yang bersifat klandestin. Hal ini ditunjukkan melalui penggeledahan pihak otoritas keamanan terhadap sejumlah tempat yang berhasil mengungkap sejumlah simbol yang tertulis melalui bendera atau mural yang bertuliskan persis seperti bendera ISIS. Akselerasi pengaruh NIIS di Indonesia dapat terjadi berkat bantuan media internet yang dengan cepat dapat menyebarkan ideologi khilâfah dan jihad yang diserukan oleh para tokohnya.[[193]](#footnote-193)

Pernyataan baiat Mujahidin Indonesia Timur kepada Daulah Islamyyah Irak dan Syam (ISIS) dari Abu Wardah Santoso Asy Syarqy Al Indunisy kepada Amirul Mukminin Abu Bakar al-Husainy al-Qurasy al-Baghdady, Amir Daulah Islamiyah Irak dan Syam. Dukungan untuk jaringan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Indonesia diorganisasi oleh sejumlah kelompok radikal lokal Islam. Motor utamanya, antara lain, Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir, terpidana kasus terorisme..[[194]](#footnote-194)

BNPT menyatakan radikalisme Nasir Abas, selain kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso juga telah berbaiat pada ISIS. Banyak pihak luar yang bukan anggota kelompok ini namun mendukung ISIS, maraknya dukungan untuk ISIS terlebih kelompok garis keras Islam di Indonesia dapat mendukung penyebaran ideologi radikal di Indonesia semakin mengkhawatirka. Maka seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam mencegah gerakan radikal dengan melaporkan bila ada kajian-kajian keagamaan yang menyimpang.[[195]](#footnote-195)

Gerakan radikal dan intoleran dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. dukungan dari beberapa kelompok Islam radikal terhadap ISIS menyiratkan bahwa gerakan Negara Islam Irak dan Suriah(ISIS) telah memasuki elemen-elemen masyarakat Indonesia dan telah berkembang hal ini tentu dapat menggangu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Gerakan perjuangan ISIS dalam penyebaran idologi telah diterima beberapa kalangan masyarakat yang bersedia mengikuti gerakan perjuangan di Irak dan Suriah atau gerakan radikal di Indonesia.[[196]](#footnote-196)

1. **Deradikalisasi Kebijakan Pemerintah Korelasinya dengan Ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah untuk Menjaga Stabilitas Politik keamanan di Indonesia**

Ancaman gerakan politik Negara Islam di Indonesia dapat mengancam dalam berbagai bentuk, mulai dari propaganda atau penyebaran ideologi, hingga ancaman teror secara terbuka dan terang-terangan kepada aparat dan Pemerintah RI. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai jaringan terorisme dari luar negeri berkembang di Indonesia. Terlebih jaringan terorisme ISIS yang kini tengah merekrut anggota dari seluruh negara termasuk Indonesia. Dalam menangulangi ancaman penyebaran ideologi BNPT mengupayakan upaya anti gerakan Radikal dengan program Deradikalisasi.[[197]](#footnote-197)

Deradikalisasi adalah upaya untuk membendung radikalisme. Radikalisme ini perlu dibendung, karena gerakan dan pemikiran individu maupun kelompok yang berorientasi pada aktivitas radikal, seperti yang mengarah pada kekerasan, peperangan dan teror, yang sangat berbahaya bagi umat manusia.[[198]](#footnote-198)

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekeraan (*violence)* dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat &keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).[[199]](#footnote-199)

Dalam menjalankan kebijakan dan strateginya, BNPT menjalankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir. Penyelasaian terorisme tidak hanya selesai dengan penegakan dan penindakan hukum (hard power) tetapi yang paling penting menyentuh hulu persoalan dengan upaya pencegahan (soft power). Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilainilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakehorlder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.[[200]](#footnote-200)

 Untuk Selanjutnya untuk membendung faham faham radikal yang menjadi akar dari gerakan radikal untuk melakukan aksi teror adalah dengan deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.[[201]](#footnote-201)

1. **Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi Keagamaan dalam Memelihara Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia**

Dideklarasikannya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) oleh sekelompok orang dan mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global segera mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, ada yang menolak dan ada pula yang mendukungnya, ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan ada pula yang menganggapnya sebagai harapan. Pihak yang menolak dan menganggapnya sebagai ancaman berasal dari sebagian besar umat Islam, termasuk para ulama dan pemimpin dunia Islam. Sedangkan pihak yang mendukung dan menganggapnya sebagai harapan berasal dari segelintir orang yang sejak awal telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam secara global walaupun dengan menggunakan pendekatan kekerasan.[[202]](#footnote-202)

 Pihak yang menolak kemunculan ISIS beserta klaimnya sebagai kekhalifahan Islam global berasal dari hampir semua komponen umat Islam. Bahkan kelompok dalam umat Islam yang selama ini dikenal sebagai pihak yang gigih mewacanakan pentingnya khilafah Islamiyah juga masuk dalam barisan pihak yang menolak pendeklarasian ISIS tersebut. Alasan yang paling menonjol dan disepakati oleh hampir semua kelompok Islam adalah terkait dengan cara yang dipergunakan oleh kelompok ISIS yang jauh dari ajaran Islam. Cara yang dipakai lebih tepat disebut sebagai teror yang mengedepankan kekerasan, kebiadaban dan ketidak-toleranan.[[203]](#footnote-203)

 Salah satu lembaga keagamaan yang ada di Indonesia yang memiliki posisi yang tegas terhadap maraknya fenomena radikalisme adalah organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Organisasi ini sangat banyak mengutarakan kecaman terhadap radikalisme di Indonesia. Secara individual, para ulama dan kiai NU diberbagai ceramah dan wawancara menunjukkan permusuhannya terhadap pemikiran-pemikiran radikalisme dan telah memperlihatkan upaya-upaya untuk ikut terlibat dalam memerangi pemikiran tersebut.[[204]](#footnote-204)

 NU memiliki posisi yang sangat penting dalam dinamika keberagamaan di Indonesia. NU adalah salah satu organisasi tertua di Indonesia dan memiliki basis pendukung sekitar 40 juta orang dari semua kalangan baik di desa maupun di kota. Serta memiliki jaringan pesantren yang cukup besar di Indonesia maka tidak salah jika sebagian penduduk umat muslim di Indonesia mengikuti pandangan Nahdatul Ulama. Dalam kasus pergerkan Negara Islam, NU menghimbau masyarakat muslim Indonesia untuk membentengi diri dari paham radikalisme dan mengikuti gerakan perjuangan ISIS.[[205]](#footnote-205)

 Menurut Nahdatul Ulama Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah sudah bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam tidak menghalalkan kekerasan terlebih pemaksaan dalam beragama.[[206]](#footnote-206) Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, dihimbau agar tetap dalam koridor yang benar dan tidak melnceng dari nilai-nilai Al Qur’an dan Hadist.[[207]](#footnote-207)

Upaya yang dilakukan NU dalam mewaspadai penyebaran ISIS adalah dengan mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, seperti pengajian, tahlilan, yasinan dan adanya kajian umum untuk masyarakat luas tentang pemahaman Islam yang sesungguhnya. Adapun dalam konteks pelibatan Muhammadiyah, Muhammadiyah memandang apa yang dilakukan ISIS justru dapat menyulut terjadinya kekerasan dan konflik yg meluas. Di tengah realitas politik umat Islam dan negara-negara Muslim, yang diperlukan adalah kerjasama antar bangsa dan antar negara.[[208]](#footnote-208)

Dalam pendekatan dengan umat Muslim di Indonesia, tokoh informal dapat menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sebuah perkumoulan yang besar. Salah satu pendekatan Pemerintah dalam mencegah paham radikal, yaitu Pesantren sebagai *roll model* pemahaman radikal dikalangan remaja.salah satunya pemimpin pondok-pondok Pesantren yang memiliki pengaruuh besar pada sebagian santri-santri di Indonesia. Melihat target-target perekrutan jihadis ISIS di Indonesia merupakan kalangan remaja, maka penting bagi tokoh informal yaitu Ulama, atau Ustad, Uztadah memberikan pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam. Dukungan kelembagaan Agama dalam hal ini NU dan Muhammdiyah serta para tokoh informal dapat memerangi paham-paham radikal intoleran yang menjadi akar aksi kekerasan di Indonesia yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.[[209]](#footnote-209)

Selain partisipasi masyarakat umum dan kelembagaan, dalam mencegah pergerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki dasar hukum dan kelembagaan dalam menjaga stabilitas politik keamanan dari ancaman gerakan Negara Islam.

1. **Konsistensi dan Komitmen Kelembagaan Pemerintah dalam memelihara Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia**

Untuk mengatasi masalah terorisme dan paham radikal, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perpres BNPT). Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres BNPT dinyatakan bahwa BNPT mempunyai tugas, terdiri atas: 1). menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; 2). mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan 3), melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.[[210]](#footnote-210)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menanggulangi propaganda radikalisme dan terorisme, termasuk di dunia maya. Mengenai deradikalisasi oleh BNPT pada umumnya desain deradikalisasi memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. [[211]](#footnote-211)

Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.[[212]](#footnote-212)

 Rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandiria adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan,Kementerian Agama, Kemenkokesra, Ormas, dan lain sebagainya.[[213]](#footnote-213)

Selain Badan Nasional Penanngulangan Terorisme (BNPT), upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas Politik Keamanan dengan adanya dukungan dari Kementerian Agama. Bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir kelompok-kelompok radikal intoleran salah satunya dengan membubarkan kelompok-kelompok garis keras yang mengusung ideologi khilafah dan mencoba menghilangkan nilai-nilai Pancasila.[[214]](#footnote-214)

1. **Tantangan dan Peluang Dalam Memelihara Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai Negara bangsa yang hidup dan tumbuh berbasis keragaman suku bangsa, agama, kepercayaan serta adat istiadat yang berkembang melebihi umur republic ini. Karena faktor-faktor tersebutlah para pendiri bangsa ini merumuskan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang disarikan dalam Pancasila dan juga pembukaan UUD sebagai basis konstitusi Negara.[[215]](#footnote-215)

 Salah satu nilai yang ada adalah toleransi dan penghormatan kepada yang berbeda. Nilai–nilai tersebut termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari atau juga diwujudkan dalam kebijakan yang melindungi semua warga Negara tanpa terkecuali. Sayangnya, seiring perjalanan waktu dan perkembangan global yang terus berubah, nilai dan prinsip tersebut terkikis sehingga menjadi sumber konflik sosial. [[216]](#footnote-216)

 Salah satu permasalahan yang saat ini terus mengemuka ke dalam ranah publik Indonesia adalah Intoleransi dan radikalisasi agama. Intoleransi dan radikalisasi agama diwujudkan dalam pelarangan kegiatan ibadah keagamaan, penyebaran kebencian, kekerasan berbasis agama ataupun pengrusakan tempat ibadah.[[217]](#footnote-217)

 Radikalisasi dan intoleran sebagai sebuah fenomena perilaku ekstrem atas sebuah ideologi, pandangan ataupun nilai sejatinya bukan dominan terjadi pada satu kelompok tertentu. Namun, fokus global terhadap isu terkait radikalisme dan terorisme kini banyak terpaku pada kelompok-kelompok berbasis Islam. [[218]](#footnote-218)

 Melihat potensi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tidak menutup kemungkinan paham radikal dapat memasuki Indonesia dan merubah nilai-nilai ideologi Pancasial untuk kepentingan suatu kelompok.[[219]](#footnote-219)

 Kelompok-kelompok radikal yang beratasnamakan agama, mencoba menyebarkan faham-faham baru yang bertentangan dengan faham Pancasila, dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan nya.[[220]](#footnote-220) Pemerintah mengambil langkah tegas untuk membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) radikal dan intoleran. Ormas dengan paham radikal dan intoleran, dinilai dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[[221]](#footnote-221)

 Melihat potensi ancaman di Indonesia pada dewasa ini lahirnya kelompok-kelompok Islam yang dapat mempengaruhi keamanan dan nilai-nilai politik di Indonesia. Pemahaman terhadap sikap kelompok Islam ini penting, tidak saja karena kekuatan dan ideologi individu atau kelompok. Komitmen mereka terhadap ideologi politik Islam, dalam menegakkan khilafah-syariah disebabkan tetapi juga karena kegigihannya dalam oleh tingginya kebutuhan untuk menolak menyebarluaskan ideologi mereka sehingga mendapatkan dukungan masyarakat luas. Selain itu sebagian kelompok seringkali sikap dan perilaku politik mendorong munculnya gerakan radikal dalam masyarakat.[[222]](#footnote-222) Gerakan radikal ini dapat memicu berbagai konflik dan kelompok intoleran.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan tercermin dengan upaya pembubaran kelompok radikal dan intoleran yang dapat mengancam keutuhan NKRI.[[223]](#footnote-223) Salah satu kebijakan Pemerintah pada saat ini ialah membubarkan gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI berpendapat bahwa pembentukan khilafah dan penerapan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara harus diperjuangkan, karena negara dengan demokrasi bertentangan dengan nilai Islam.[[224]](#footnote-224)

 Menko Polhukam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah menganggap HTI dapat mengancam kedaulatan negara. HTI disebut ingin menghapus negara Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan Islam.[[225]](#footnote-225)Pemerintah Indonesia melalui bidang terkait mencoba bersama menyelesaikan masalah kelompok radikal dan intoleran yang dapat mengancam persatuan NKRI. Mempertahankan nilai-nilai Pancasila merupakan dasar bagi Negara Indonesia. Gerakan kaum intoleran dan radikal sudah menguasai pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Kelompok intoleran dan radikal menyebarkan kebencian dengan berkedok agama secara masif, intensif dan berlanjut. Dengan dukungan aparat Negara dan dukungan keterlibatan masyarat dapat membendung faham-faham radikal dan intoleran yang dapat mengancam stabilitas politik keamanan di Indonesia.[[226]](#footnote-226)

**BAB V**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Pengaruh Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) Terhadap Stabilitas Politik Keamanan di Indonesia, maka dapat disimpulakn ke dalam beberapa poin yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan serta membuktikan hipotesa yang telah dibuat, diantaranya:

***Pertama,*** bentuk gerakan politik dijadikan sebagai instrument atau alat ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia, melalui penyebaran ideologi melalui media dan perekrutan jihadis di Indonesia, serta dukungan dari gerakan politik kelompok garis keras di Indonesia yang menyatakan dukungan serta aksi bai’at terhadap Gerakan ISIS merupakan bagian dari ideologisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

***Kedua,*** kebijakan deradikalisasi dalam memerangi faham-faham radikal di Indonesia didukung oleh partisipasi masyarakat dan organisasi kelembagaan agama dalam hak ini bentuk dukungan NU dan Muhammadiyah dalam membentengi masyarakat Inddonesia dari faham-faham radikal intoleran, serta konsistensi pemerintah mengambil tindakan pembubran gerakan kelompok yang mencoba menghilangkan falsafah Pancasila untuk memelihara stanilitas politik keamanan di Indonesia.

Dengan adanya potensi ancaman gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dapat mengancam stabilitas politik keamanan di Indonesia, sehingga peningkatan tindakan pencegahan dari faham radikal intoleran merupakan upaya dalam memelihara stabilitas politik keamanan di Indonesia.

1. Hillel Frisch dan Efraim Inbar (Eds.), Radical Islam and International Security: Challenges and responses (New York: Routledge, 2008), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tim Penyusun CSR, Focus Countries Terrorism in South Asia Journal, 2005, hlm.9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Robert Spencer, The Complete Infidel’s Guide to ISIS (Washington: Regnery Publishing, 2015), hlm. 24-25 [↑](#footnote-ref-3)
4. Syria Iraq: The Islamic State Militant Group”, BBC News Middle East dalam [www.bbc.com](http://www.bbc.com) diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 11.10 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muktafi Ni‟am, Mengenal Ideologi ISIS dan Sepak Terjangnya dalam www.nu.or.id diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 11.20 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, hlm. s26. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zen Fathurin,Radikalisme Retoris (Jakarta: Bumen Pustaka Emas 2002), hlm 21 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Aaron Y. Zelin, The War Between ISIS and al Qaeda for Supremacy of The Global Jihadist Movement (NewYork: the Institute for the Study of War,2015), hlm.45 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ali Fisher dan Nico Prucha, dalam “ISIS Is Winning the Online Jihad Against the West”, The Daily Beast, <http://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/01/isis-is-winning-the-online-jihad-against-the-west.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 10.12 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jessica Elgot dkk., "Paris Attacks: Day After Atrocity - As It Hapened", The Guardian (Online), dalam dalam http://www.theguardian.com/world/live/2015/nov/14/paris-terrorattacks-attackers-dead-mass-killing-live-updates,diakses pada 28 Februari 2017 pukul 14.53 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. SIS Forces Last Iraqi Christians to Flee Mosul dalam http://www.nytimes.com/2014/07/19/world/middleeast/isis-forces-last-iraqi-christians-toflee-mosul.html?\_r=0 diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pada pukul 17.45 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Solahudin, NII Sampai JI Salafy Jihadisme Di Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu 2001), hal 53. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dirk Tomsa, “The Jakarta Terror Attack and it’s Implication for Indonesia and Regional Security dalm jurnal Research at Iseas Yosof Ishak Istitute Share Their Understanding of Current Events, Vol 01 No 05 (Januari,2016) [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. “Indonesia Larang Penyebaran Ideologi ISIS” dalam hhtp//www.bbc.co.uk/Indonesia/berita\_indonesia/2016/08/140804.html. diakses pada 28 Februari 2017 pukul 19.45 WIB [↑](#footnote-ref-18)
19. BNPT: ISIS Termasuk Kelompok Teroris <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/01/078596659/BNPT-ISIS-TermasukKelompok-Teroris> diakses pada tanggal 20 March 2017 pada pukul 10.40 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. Masdar Hilmy, Genealogi dan Pengaruh Jihadisme di Indonesia dalam jurna Teosofi Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol 04 No 02 ( Desember,2014), hlm.102. [↑](#footnote-ref-21)
22. Begini Proses Perekrutan Anggota ISIS Hingga Pencarian Dana dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/19/nlgt59-begini-proses-perekrutan-anggota-isis-hingga-pencarian-dana diakses pada 19 Februari 2017, pukul 12.32 WIB [↑](#footnote-ref-22)
23. Hermawan Sulistyo, Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society (Jakarta: Pensil 324 2009), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-23)
24. “Buku Putih Pertahanan : Mempertahankan Tanah Air memasuki Abad 21” dalam <http://www.dephan.go.id/buku_putih/> diakses pada 28 FebruarI 2017 pada pukul 21.16 WIB [↑](#footnote-ref-24)
25. Hermawan Sulistyo, Op.Cit.,14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Op.Cit. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. “Buku Putih Pertahanan : Mempertahankan Tanah Air memasuki Abad 21” dalam <http://www.dephan.go.id/buku_putih/> diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 21.30.WIB [↑](#footnote-ref-28)
29. KJ.Holsti, *Politik Internasional Dalam Kerangkka Analisa ,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987) hlm.25-27 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, hlm.35. [↑](#footnote-ref-30)
31. Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional (*Terjemahan Dadan Suryadipura), (Yogyakarat; Pustaka Pelajar,2009), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-31)
32. Barry Buzan, *People, States, and Fear The National Security Problem in International Realtions* ( Inggris : A member of the Harvester Press Group 1983), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-33)
34. Barry Buzan,” *New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century”* dalam International Affairs, 67.3 (1991), hlm. 432-433. [↑](#footnote-ref-34)
35. Martha Crenshaw, *“The Causes of Terrorism”,* dalam *Comparative Politics, Vol. 13, No. 4. (July,1981),* hlm*. 379-39* [↑](#footnote-ref-35)
36. Kiras, James D, *“Terorism and Globalization in Baylis*” dalam John, Smith, Steve (ed), *The Globalization of World Politics 3rd editon*, (New York: Oxford University Press,2005) hlm.495. [↑](#footnote-ref-36)
37. Jack C Plano dkk, *Kamus Analisa Politik* (Terjemahan Edi S Siregar) (Jakarta: Rajawali,1989) hlm, 253-245. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-38)
39. K.J Holsti., *Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-39)
40. Muslim Mufti, Pemikiran Politik Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm 129. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan 2009), hlm. 166. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
43. Agus Herlambang(Ed), *Kemunculan Fundamentalisme Islam : Sebuah Paradoks Globalisasi* (Bandung: FISIP UNPAS, 2009), hlm.1. [↑](#footnote-ref-43)
44. Hadi, Akar kemunculan islam radikal di Indonesia (Gramedia : Jakarta 2015), hlm. 66. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
47. Jack. C Plano dkk., *Op.Cit*, hlm 112. [↑](#footnote-ref-47)
48. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia,1983), hlm 162. [↑](#footnote-ref-48)
49. Robert Spencer, The Complete Infidel’s Guide to ISIS (Washington: Regnery Publishing, 2015), hlm. 30-31. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid., hlm. 31-32 [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid., hlm. 32. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ibid., hlm. 32-33. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibid., hlm. 33. [↑](#footnote-ref-54)
55. Ibid., hlm. 33-34. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ibid., hlm. 34. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibid., hlm. 34-35 [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibid., hlm. 35-36 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid., hlm. 36. [↑](#footnote-ref-59)
60. Richard Barret, "The Islamic State" The Soufan Group (Online), New York, November 2014, dalam http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TSG-The-Islamic-State-Nov14.pdf, diakses pada 22 February 2017 pada pukul 21.10 WIB. [↑](#footnote-ref-60)
61. Robert Spencer, Loc.Cit [↑](#footnote-ref-61)
62. Richard Barret, Loc.Cit [↑](#footnote-ref-62)
63. Robert Spencer, Loc.Cit [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid., hlm. 36-37 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibid., hlm. 41-42 [↑](#footnote-ref-65)
66. Ibid., hlm. 42 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ibid. [↑](#footnote-ref-67)
68. Richard Barret, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ibid. [↑](#footnote-ref-69)
70. Robert Spencer, Op.Cit., hlm. 148 [↑](#footnote-ref-70)
71. Ibid., hlm. 151. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ibid., hlm. 152. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ibid., hlm. 153-154. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ibid., hlm. 156-157. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibid., hlm. 157. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibid., hlm. 158-159 [↑](#footnote-ref-76)
77. Ibid., hlm. 159-161 [↑](#footnote-ref-77)
78. “Foreign Fighters: An Update Assessment of the Flow of Foreign into Syriaand Iraq”, dalam http://www.soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG\_ForeignFightersUpdate3.pdf, diakses pada24 February 2017 pada pukul 22.30 WIB [↑](#footnote-ref-78)
79. Ibid [↑](#footnote-ref-79)
80. Ibid., hlm. 182-183 [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibid., hlm. 183-184 [↑](#footnote-ref-81)
82. Ibid., hlm. 191-193 [↑](#footnote-ref-82)
83. Ibid., hlm. 194-195 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ibid., hlm. 195. [↑](#footnote-ref-84)
85. Ibid., hlm. 206-207 [↑](#footnote-ref-85)
86. Ibid., hlm. 250 [↑](#footnote-ref-86)
87. Ibid., hlm. 252-253 [↑](#footnote-ref-87)
88. Zulkarnain El Madury, Konsep Takfir Dalam Islam”, dalam Kompasiana www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 21.11 WIB. [↑](#footnote-ref-88)
89. “Syria Iraq: The Islamic State Militant Group”, BBC News Middle East, dalam www.bbc.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 21,20 WIB.. [↑](#footnote-ref-89)
90. Menag Paparkan Konsep Khilafah, Takfir dan Jihad di Mabes Polri” dalam Multimedia News, [www.multimedianews.com](http://www.multimedianews.com), diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 21.45 WIB. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ibid. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-92)
93. “An Islamic Caliphate in Seven Easy Ways”, dalam www.siotw.org/news\_english.item.1290/anislamic-caliphate-in-seven-easy-steps.html, diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pada pukul 21.36 WIB. [↑](#footnote-ref-93)
94. Ibid [↑](#footnote-ref-94)
95. Ibid. [↑](#footnote-ref-95)
96. Ibid [↑](#footnote-ref-96)
97. Ibid. [↑](#footnote-ref-97)
98. Ibid. [↑](#footnote-ref-98)
99. Ibid. [↑](#footnote-ref-99)
100. “ISIS Terror Strategy in Europe”, dalam http://www.mei.edu/content/article/isis-terror-strategyeurope, diakses pada 28 Februari 2017 pada pukul 22.05 WIB. [↑](#footnote-ref-100)
101. Ibid. [↑](#footnote-ref-101)
102. Ibid. [↑](#footnote-ref-102)
103. Ibid. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ibid. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ali Fisher dan Nico Prucha, “ISIS Is Winning the Online Jihad Against the West”, The Daily Beast, dalam (<http://www.thedailybeast.com/articles/2016/10/01/isis-is-winning-the-online-jihad-against-the-west.html>) diakses pada tanggal 13 Maret 2017 pada pukul 22.45 WIB [↑](#footnote-ref-105)
106. Paul D. Williams, Security Studies: An Introduction, (Oxon: Routledge, 2013), hlm,1. [↑](#footnote-ref-106)
107. Ibid. [↑](#footnote-ref-107)
108. Prime Minister’s Office, “Threat level from international terrorism raised: PM press statement”, GOV.UK, dalam <https://www.gov.uk/government/speeches/threat-level-from-international-terrorism-raised-pm-press-conference>, diakses pada 13 Maret 2017 pada pukul 23.45 WIB. [↑](#footnote-ref-108)
109. Hermawan Sulistyo. 2009. Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society. Jakarta: Pensil 234, hlm 25. [↑](#footnote-ref-109)
110. Ibid. [↑](#footnote-ref-110)
111. Postur Pertahanan Negara 2015 diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-111)
112. Ibid. [↑](#footnote-ref-112)
113. Ibid [↑](#footnote-ref-113)
114. Ibid. [↑](#footnote-ref-114)
115. Ibid. [↑](#footnote-ref-115)
116. Ibid, hlm 18 [↑](#footnote-ref-116)
117. Ibid. [↑](#footnote-ref-117)
118. Op.Cit. [↑](#footnote-ref-118)
119. Op. Cit, hlm 84. [↑](#footnote-ref-119)
120. Ibid. [↑](#footnote-ref-120)
121. Ibid. [↑](#footnote-ref-121)
122. Sukma Rizal, Konsep Keamanan Nasional, dalam http://www. propatria.or.id/download/ Paper%20Diskusi/konsep\_ kamnas\_rs.pdf diakses pada tanggal 14 April 2017 pada pukul 11.11 WIB. [↑](#footnote-ref-122)
123. Susanto Ahmad , Keamanan Nasiona (Jakarta: Protarian Press 2009), hlm 24. [↑](#footnote-ref-123)
124. Ibid. [↑](#footnote-ref-124)
125. Loc.Cit [↑](#footnote-ref-125)
126. Agus Wirahadikusuma. 1999. Inddonesia Baru dan Tantangan TNI. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, hlm 33 [↑](#footnote-ref-126)
127. Ibid. [↑](#footnote-ref-127)
128. Ibid. [↑](#footnote-ref-128)
129. Ibid. [↑](#footnote-ref-129)
130. Ibid. [↑](#footnote-ref-130)
131. Koesnadi Kardi. 1999. TNI kembali ke Jati Diri Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, hlm 61. [↑](#footnote-ref-131)
132. Ibid [↑](#footnote-ref-132)
133. Hermawan Sulistyo. 2009. Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society. Jakarta: Pensil 234, hlm 25. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ibid. [↑](#footnote-ref-134)
135. Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. [↑](#footnote-ref-135)
136. Ibid, Hermawan Selistyo. [↑](#footnote-ref-136)
137. Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 14. [↑](#footnote-ref-137)
138. Ibid [↑](#footnote-ref-138)
139. Nugroho Notosusanto, Prajurit dan Pejuang, Persepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI, Jakarta: Sinar Harapan, Cet II 2016, hlm 44. [↑](#footnote-ref-139)
140. Ibid. [↑](#footnote-ref-140)
141. Ibid. [↑](#footnote-ref-141)
142. Rizal Sukma, Konsep Keamanan Nasional, (Jakarta:CSIS, 2002), hlm 45. [↑](#footnote-ref-142)
143. Ibid. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ibid. [↑](#footnote-ref-144)
145. Ibid, Hermawan Selistyo. [↑](#footnote-ref-145)
146. M gausyah [↑](#footnote-ref-146)
147. Ibid. [↑](#footnote-ref-147)
148. Untung S Rajab, Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Kenegaraan Berdasrkan UUD 1945 (Bandung; Gramedia 2011), hlm 56. [↑](#footnote-ref-148)
149. Ikhrar Nusa Bhakti [↑](#footnote-ref-149)
150. Hermawan Sulistyo, Op. Cit. [↑](#footnote-ref-150)
151. Syarifudin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia (Jakarta: P T Fajar Interpratama Mandiri 2016), hlm 229. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ibid, 233. [↑](#footnote-ref-152)
153. Ibid. [↑](#footnote-ref-153)
154. Ibid. [↑](#footnote-ref-154)
155. Ibid. [↑](#footnote-ref-155)
156. Ibid. [↑](#footnote-ref-156)
157. Ibid. [↑](#footnote-ref-157)
158. Ibid, 245. [↑](#footnote-ref-158)
159. Ibid, hlm 236. [↑](#footnote-ref-159)
160. TB Ronny Natibaskara dalam Radikalisme dan Intoleransi Harian Kompas 3 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-160)
161. Ibid. [↑](#footnote-ref-161)
162. Ibid. [↑](#footnote-ref-162)
163. Ibid. [↑](#footnote-ref-163)
164. Hamidin, “Seminar ASEAN dan Penanggulangan Terorisme di Kawasan, Aula Sudreja, Bandung 24 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-164)
165. Ibid. [↑](#footnote-ref-165)
166. Ibid. [↑](#footnote-ref-166)
167. 3 Ancaman ISIS dalam <http://news.liputan6.com/read/2373137/3-ancaman-isis-ke-indonesia> diakses pada tanggal 21 April 2017 pada pukul 18.30 WIB. [↑](#footnote-ref-167)
168. Ibid. [↑](#footnote-ref-168)
169. Ibid, Hamidin dalam seminar ASEAN dan Penanggulangan Terorisme di Kawasan, Aula Sudreja, Bandung 24 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-169)
170. Ibid. [↑](#footnote-ref-170)
171. Ali, As‟ad Said. Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya. Jakarta: LP3ES, 2014, hlm 56. [↑](#footnote-ref-171)
172. Ibid [↑](#footnote-ref-172)
173. Masdar Hilmy, Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia (Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 04 No. 02 Desember 2014, diterbitkan Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya), 406-407. [↑](#footnote-ref-173)
174. Ibid. [↑](#footnote-ref-174)
175. Ibid. [↑](#footnote-ref-175)
176. “Iraq‟s Second Largest City Falls to Extremists”, Time, 10 Juni 2014 (time.com, diakses 4 Desember 2014). [↑](#footnote-ref-176)
177. Sejumlah warga Indonesia muncul dalam video ISIS dalam [http://internasional.kompas.com/read/2014/07/30/09022331/Sejumlah.WarW a.Indonesia.Muncul.Dalam.Video.ISIS](http://internasional.kompas.com/read/2014/07/30/09022331/Sejumlah.WarW%20a.Indonesia.Muncul.Dalam.Video.ISIS) diakses pada tanggal 13 April 2017 pada pukul 23.45 WIB. [↑](#footnote-ref-177)
178. Militan asing isis dalam http://international.sindonews.com/ read/1047128/40/militan-asing-isis diakses pada tanggal 13 April 2017 pada pukul 24.09 WIB. [↑](#footnote-ref-178)
179. Heru, Susetyo.2016.” Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”. Lex Jurnalica Vol. 6 No.01.: hlm 45 [↑](#footnote-ref-179)
180. Ibid. [↑](#footnote-ref-180)
181. Ibid. [↑](#footnote-ref-181)
182. Fajar Purwawidada, Jaringan Baru Teroris Solo (Jakarta: Kepustakaan Popuper Gramedia, 2014), 104 [↑](#footnote-ref-182)
183. As‟ad Said Ali, Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya (Jakarta: LP3ES, 2014), 335-336 [↑](#footnote-ref-183)
184. Cole Bunzer. 2015. “From paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State”. Jurnal Center for Middle East Policy, Vol. 2015, No. 15. New Jersey: Princeton University. hlm. 1-45. Diakses dari buku online: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/ideology-of-islamic-state-bunzel/the-ideology-of-the-islamicstate.pdf. Pada tangga 28 FebruarI 2017 pada pukul 18.30 WIB. [↑](#footnote-ref-184)
185. Ibid. [↑](#footnote-ref-185)
186. Ibid 339. [↑](#footnote-ref-186)
187. Indonesia Larang Penyebaran Ideologi ISIS dalam BBC News <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140804_indonesia_larang_faham_isis> diakses pada tanggal 12 Mei 2017 pada pukul 19.34 WIB. [↑](#footnote-ref-187)
188. [↑](#footnote-ref-188)
189. “NIIS DI INDONESIA: 56 WNI ke Suriah, 4 Tewas karena Bom Bunuh Diri”, Solopos, 14 Agustus 2014 (www.solopos.com, diakses 30 Nopember 2014); [↑](#footnote-ref-189)
190. Mohammed Abu-Nimer, “Islamic Principles of Nonviolence and Peacebuilding: A Framework”, dalam Daniel Brumberg dan Dina Shehata (eds.), Conflict, Identity, and Reform in the Muslim World (Washington, US Institute of Peace Press, 2009), 148. [↑](#footnote-ref-190)
191. “Ini Daerah yang Dicurigai Rawan Penyebaran NIIS”, Republika Online, 18 Agustus 2014 (www.republika.co.id, diakses 30 Nopember 2014). [↑](#footnote-ref-191)
192. Muhammad Wildan, “Mapping Radical Islam: A Study of the Proliferation of Radical Islam in Solo, Central Java”, dalam Martin van Bruinessen (ed.), Contemporary Developments in Indonesian Islam (Singapore: ISEAS, 2013), 190-191. [↑](#footnote-ref-192)
193. “ISIS Chief Emerges, Urging „Volcanoes of Jihad”, The New York Times, 13 November 2014, www.nytimes.com, diakses 3 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-193)
194. “Kiblat Radikalisme dalam HARIAN Kompas <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/12/o0tyga1-kiblat-radikalisme-mengapa-mujahidin-indonesia-timur-mit-menjadi-sentral-dari-gerakan-jaringan-kelompok-terduga-teroris-di-indonesia> diakses pada tanggal 9Mei 2017 pada pukul 11.03 WIB. [↑](#footnote-ref-194)
195. Imam Subandi, ““Seminar ASEAN dan Penanggulangan Terorisme di Kawasan, Aula Sudreja, Bandung 24 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-195)
196. Ibid. [↑](#footnote-ref-196)
197. “ Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Teroris – ISIS” diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulan Terorisme dalam <https://damailahindonesiaku.com/nu-telah-terapkan-konsep-darussalam-jauh-sebelum-kemerdekaan.html>, diakses pada tanggal 23 April 2017 pada pukul 19.25 WIB. [↑](#footnote-ref-197)
198. Ibid. [↑](#footnote-ref-198)
199. A.M. Hendroprioyono, Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-199)
200. Andi Wijaya, Laporan Kajian dan Permusan Mekanisme Alternatif Managemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia(Jakarta: Kemitraan Partnership,2007), hlm 44. [↑](#footnote-ref-200)
201. Ibid [↑](#footnote-ref-201)
202. Ibid. [↑](#footnote-ref-202)
203. Ibid. [↑](#footnote-ref-203)
204. Ibid [↑](#footnote-ref-204)
205. “ISIS sesat dan meyesatka dalam surat kabar media Islam <https://kabarislamia.com/2014/09/08/pendapat-ulama-isis-sesat-dan-menyesatkan/> diakses pada tanggal 8 April 2017 pada pukul 19.20 WIB. [↑](#footnote-ref-205)
206. Ibid. [↑](#footnote-ref-206)
207. Ibid. [↑](#footnote-ref-207)
208. Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan,Fakta, dan Tantangan (Bandung: Mizan 2015), hlm 56. [↑](#footnote-ref-208)
209. Hamidin, “Seminar ASEAN dan Penanggulangan Terorisme di Kawasan, Aula Sudreja, Bandung 24 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-209)
210. Imam Subandi, “Seminar ASEAN dan Penanggulangan Terorisme di Kawasan, Aula Sudreja, Bandung 24 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-210)
211. Ibid. [↑](#footnote-ref-211)
212. Asghar Khan, Islam, Politics and the State, the Pakistan Experimence (London: Zeed Books Ltd 2008), hlm 33. [↑](#footnote-ref-212)
213. Ibid. [↑](#footnote-ref-213)
214. Ibid, Imam Subandi. [↑](#footnote-ref-214)
215. Yahya A Muhaimin, Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia(Yogyakarta: Tiara Wacana 2008), Hlm 24. [↑](#footnote-ref-215)
216. Ibid. [↑](#footnote-ref-216)
217. Ibid. [↑](#footnote-ref-217)
218. Abuza, Zachary, Political Islam and Violence in Indonesia(London: Routledge 2007), hlm 56. [↑](#footnote-ref-218)
219. Awwas, Irfan S. (ed.), Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari’ah Islam. (Yogyakarta: Wihdah Press, 2001), hlm 62. [↑](#footnote-ref-219)
220. Ibid [↑](#footnote-ref-220)
221. Ibid. [↑](#footnote-ref-221)
222. Anwar Syafi’I 1992.”Islam,Negara,dan Formasi Sosial” dalam jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an. Vol 3 No.3, hlm 22. [↑](#footnote-ref-222)
223. Ibid. [↑](#footnote-ref-223)
224. Turmudi, E. dan Sihbudi, R. (edit),Islam dan radikalisme di Indonesia(Jakarta: LIPI Press 2016), hlm 42. [↑](#footnote-ref-224)
225. Mekanisme Pembubaran HTI dalam Harian Kompas <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/12340701/hti.kami.menolak.keras.pembubaran> diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pada pukul 11.45 WIB [↑](#footnote-ref-225)
226. Saeed, A. dalam Choir, T., Fanani, A. (ed), (2009), Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), Hlm 434. [↑](#footnote-ref-226)